

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah hasil dari kesepakatan global yang dicapai dalam Konferensi Rio atau KTT Bumi, salah satu konferensi utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertemuan ini diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, dari tanggal 3 hingga 14 Juni 1992, dan dihadiri oleh perwakilan dari 172 negara, termasuk 108 kepala negara atau pemerintahan. SDGs sebagai komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan laporan ICSU tahun 2015 dalam Pertiwi (2017), bahwa *Sustainable Development Goals* mencakup 17 tujuan atau goals yang harus dicapai. Tujuan tersebut, di antaranya yaitu (1) pengentasan kemiskinan; (2) mengakhiri kelaparan; (3) kesehatan; (4) pendidikan; (5) gender; (6) air bersih dan sanitasi yang layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi; (9) infrastruktur dan inovasi; (10) mengurangi ketimpangan; (11) kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan; (12) produksi dan konsumsi; (13) penanganan perubahan iklim; (14) sumber daya laut; (15) ekosistem darat; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; serta (17) peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yang dirancang untuk mengatasi tantangan global secara lebih komprehensif. SDGs melibatkan negara-negara maju dan berkembang yang mendorong komitmen peningkatan pendanaan yang lebih

besar untuk mencapai target-targetnya. SDGs menekankan pada hak asasi manusia, memastikan bahwa upaya pembangunan bersifat inklusif dan adil bagi semua masyarakat. Selain itu, SDGs mendorong kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk bisnis, media, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan jangka panjang.



Gambar 1.1 Sustainable Development Goals

Sumber: Satudata.demakkab.go.id (2025)

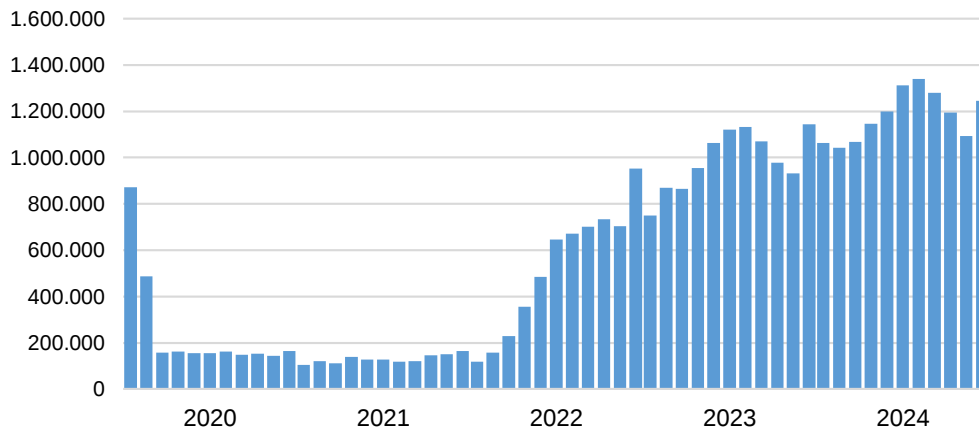
Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor pariwisata menekankan peran pentingnya dalam mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pariwisata berkontribusi langsung pada pilar 1 SDG (pengentasan kemiskinan) dengan menciptakan peluang kerja dan meningkatkan ekonomi lokal, terutama di desa dan daerah tertinggal. Hal ini selaras dengan tujuan 8 (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi) dengan mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja sambil memastikan upah yang adil dan kondisi kerja yang aman. Selain itu, pariwisata juga mendukung tujuan 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan) dengan mendorong kolaborasi antara pelaku wisata, pemerintah, bisnis, dan masyarakat lokal guna mengembangkan kebijakan

pariwisata yang inklusif dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan tujuan keberlanjutan, sektor pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, memberdayakan masyarakat lokal, dan meningkatkan pelestarian lingkungan, sehingga menjadi pendorong utama dalam mencapai SDGs.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang berpotensi menciptakan perubahan dalam perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam, penyediaan layanan publik, dan pembangunan daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Sektor ini berkontribusi terhadap kemajuan negara. Pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata harus menjadi prioritas utama jika suatu negara ingin berkembang dengan cepat (Rosardi dalam Alfiah et al. 2025). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mengupayakan peningkatan sektor pariwisata di Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya di setiap daerah (Antara & Mandala dalam Alfiah et al. 2025). Upaya pengembangan dan peningkatan pariwisata ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Regulasi ini menetapkan kriteria pengembangan pariwisata berkelanjutan yang mencakup manajemen yang berkelanjutan, keberlanjutan ekonomi dan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta keberlanjutan budaya, yang semuanya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai sasaran pembangunan global.

Sektor pariwisata di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Salah satu pencapaian utama adalah kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB yang mencapai 4,01 persen pada paruh pertama tahun 2024, melampaui angka tahun sebelumnya

sebesar 3,9 persen. Selain itu, pariwisata Indonesia juga mendapatkan pengakuan internasional dengan mendapatkan 67 penghargaan dari 32 organisasi pariwisata global. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga menerima tujuh penghargaan dari berbagai kementerian dan lembaga (Hendriyani, 2024). Selain itu, terdapat peningkatan yang stabil dalam kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari tahun 2020 hingga 2024, yang semakin menyoroti pemulihan dan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan ekonomi dalam sektor pariwisata salah satunya karena adanya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara yang banyak datang ke Indonesia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Berikut akan disajikan data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut kebangsaan.

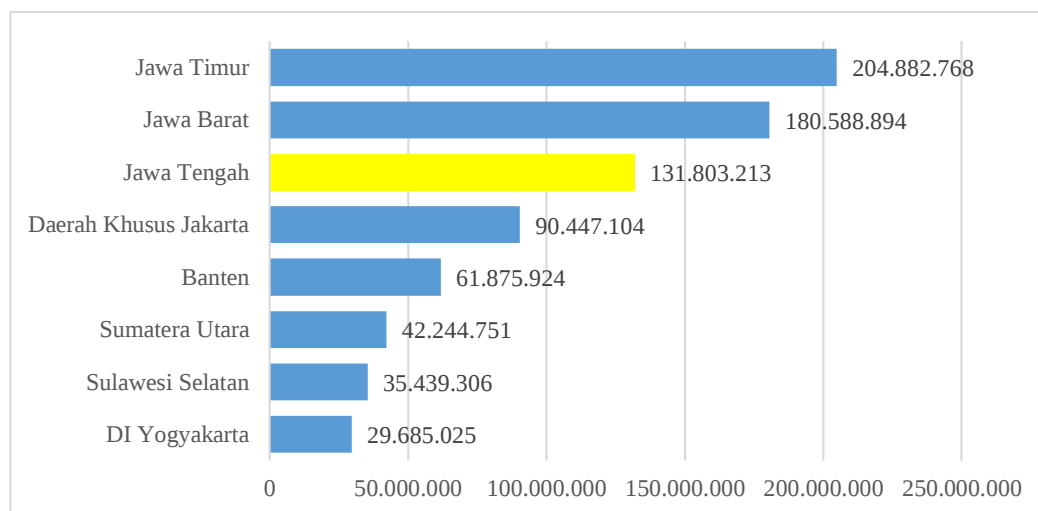


Gambar 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia (Januari 2020-Desember 2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas, diketahui bahwa pada bulan Desember 2024 terdapat 1.244.372 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang mana angka tersebut meningkat 13,95% dibanding bulan sebelumnya (bulan ke bulan). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023,

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Desember 2024 turut melesat sebesar 8,72% (tahun ke tahun). Hal tersebut disebabkan Indonesia memiliki banyak pilihan destinasi wisata atau daerah yang dapat dikunjungi oleh wisatawan mancanegara.



Gambar 1. 3 Provinsi Asal dengan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Terbanyak (2024)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, diketahui bahwasanya provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan nusantara terbanyak pada tahun 2024 adalah Jawa Timur yang mencapai 204.882.768. Angka tersebut menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya Provinsi Jawa Barat menyusul di posisi kedua dengan jumlah 180.588.894. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan jumlah perjalanan wisatawan nusantara sebanyak 131.803.213.

Pengembangan pariwisata melalui desa wisata di Jawa Tengah merupakan salah satu sektor yang perlu dikembangkan. Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam desa wisata yang memiliki kearifan lokal. Jawa Tengah memiliki 7.809

desa yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. Menurut data dari Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, terdapat total 776 desa wisata. Desa-desa ini dikategorikan ke dalam berbagai tahap pengembangan: 583 desa masih dalam tahap rintisan, 159 diklasifikasikan sebagai desa berkembang, dan 34 desa telah mencapai status maju (Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2024b). Dengan adanya klasifikasi ini, sangat penting untuk meningkatkan pengembangan desa wisata yang sudah ada untuk memaksimalkan potensi mereka di masa depan.

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang menjanjikan adalah Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya di setiap daerah. Upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pariwisata ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025. Peraturan ini menekankan pentingnya pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan fokus yang kuat pada partisipasi masyarakat baik dalam pengelolaan maupun pengembangan destinasi wisata. Menyadari bahwa pariwisata bukan hanya aset ekonomi tetapi juga aset budaya dan lingkungan, peraturan ini mendorong pertumbuhan inklusif dengan mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pengembangan kapasitas, dan mekanisme pembagian manfaat. Dalam rencana tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur pariwisata, memperkuat promosi, dan

meningkatkan daya saing industri pariwisata lokal. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan mempromosikan kolaborasi antar pemangku kepentingan, peraturan tersebut bercita-cita untuk membangun sektor pariwisata yang tangguh yang berkontribusi pada kesejahteraan lokal sambil melestarikan warisan alam dan budaya Kabupaten Temanggung. (Anwarudin, 2025).

Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 23 kelurahan, 266 desa, 1.568 dusun, 1.731 lingkungan, dan 1.505 RW, serta 5.909 RT, dengan Kecamatan Temanggung sebagai pusat pemerintahan. Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang. Kabupaten Temanggung berada pada posisi strategis di antara dua pusat pariwisata yang terkenal, yaitu Kabupaten Wonosobo yang merupakan rumah bagi kawasan wisata Dieng, dan Kabupaten Magelang yang terkenal dengan Candi Borobudur (Wardoyo, 2023).

Sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan meningkatkan pariwisata lokal. Penguatan sektor ini menjadi salah satu strategi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat setempat. Industri pariwisata yang sudah berkembang dengan baik dapat menciptakan berbagai lapangan kerja, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Elpisah & Suarlin dalam Gandhi, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiarto et al. dalam Gandhi (2024) yang

menyoroti bahwa pengembangan pariwisata merupakan keputusan kebijakan yang krusial, khususnya bagi daerah yang memiliki potensi pariwisata yang signifikan. Penelitian tersebut menekankan bahwa inisiatif pariwisata yang terencana dengan baik dapat memberikan dampak yang luas, tidak hanya dalam mendorong kegiatan ekonomi lokal, namun juga dalam memengaruhi dinamika sosial, termasuk pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, perumusan dan implementasi kebijakan pariwisata harus didekati dengan pola pikir yang strategis dan inklusif, memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan, adil, dan selaras dengan nilai dan kapasitas lokal.

Tabel 1. 1

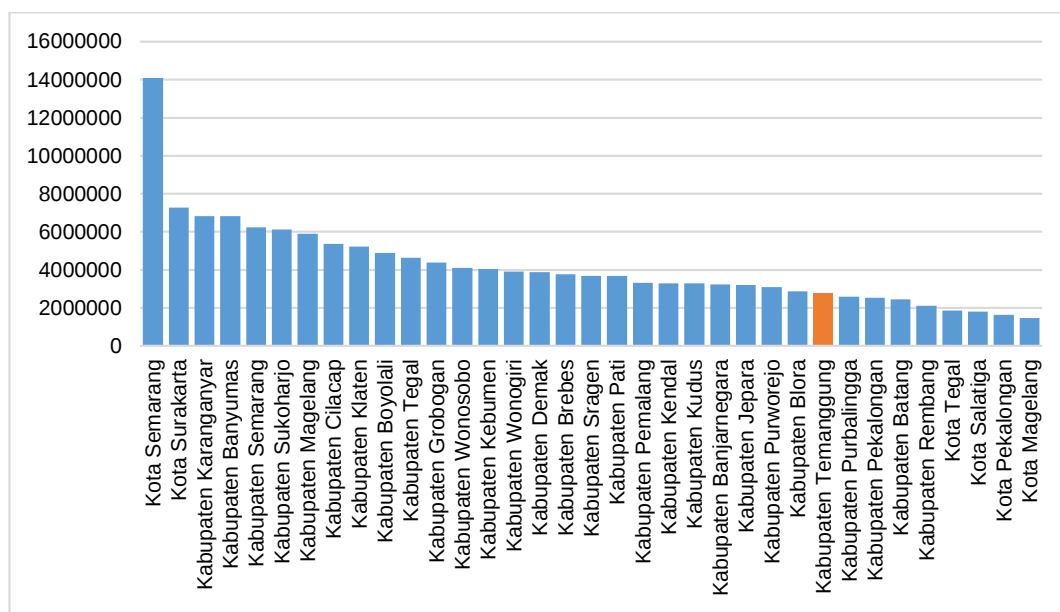
10 Kabupaten/Kota di Jateng dengan Pendapatan Pariwisata Tertinggi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan		Pendapatan (Rp)
		Nusantara	Mancanegara	
1	Klaten	6.293.175	163.882	194.179.450.098
2	Semarang Kab	3.531.786	2.344	52.317.875.166
3	Purbalingga	2.482.974	7	33.255.108.890
4	Banjarnegara	1.779.430	-	32.498.952.936
5	Surakarta	4.019.566	10.120	31.981.547.599
6	Kebumen	2.036.275	-	16.290.389.925
7	Cilacap	1.292.702	-	12.468.466.500
8	Boyolali	964.785	1.348	10.362.819.511
9	Rembang	1.846.108	26	9.800.012.059
10	Temanggung	582.727	37	8.243.068.579

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2023)

Berdasarkan tabel 1.1, pada tahun 2023 sektor pariwisata di Kabupaten Temanggung berada di urutan ke-10 di antara 10 kabupaten dan kota dengan pendapatan pariwisata tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Total pendapatan dari pariwisata di Kabupaten Temanggung mencapai Rp8.243.068.579, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Klaten yang menduduki peringkat

tertinggi dengan pendapatan Rp194.179.450.098. Kesenjangan yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Temanggung belum mencapai potensi maksimalnya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.



Gambar 1. 4 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Menurut Kabupaten/Kota Tujuan di Jawa Tengah, 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2025)

Berdasarkan gambar di 1.4, Kota Semarang menempati peringkat tertinggi dengan kunjungan wisatawan 14.083.672 wisatawan, diikuti oleh Kota Surakarta (7.270.333) dan Kabupaten Karanganyar (6.820.322). Sebaliknya, Kabupaten Temanggung, dengan 2.771.093 wisatawan, menempati peringkat ke-27 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jauh lebih rendah daripada Kabupaten Magelang (5.889.765) dan Kabupaten Wonosobo (4.099.234) yang berdekatan.

Tabel 1. 2 Desa Wisata di Kabupaten Temanggung

No	Nama Desa Wisata	Nama Desa	Kecamatan
1	Liyangan	Purbosari	Ngadirejo
2	Dewi Era Maya	Ngropoh	Kranggan
3	Trah Aji	Traji	Parakan
4	Cepag	Pagergunung	Bulu
5	Banyu Suci	Tegalrejo	Ngadirejo

No	Nama Desa Wisata	Nama Desa	Kecamatan
6	Pusar Bumi	Soropadan	Pringsurat
7	Masjid Wali & Makam Kyai Pahing	Menggoro	Tembarak
8	Curug Surodipo	Tawang Sari	Wonoboyo
9	Makukuhan	Makukuhan	Kedu
10	Tlahab	Tlahab	Kledung
11	Pluralisama	Getas	Kaloran
12	Rejosari	Rejosari	Bansari
13	Tlogowero	Tlogowero	Bansari
14	Mranggen Kidul	Mranggen Kidul	Bansari
15	-	Tegowanuh	Kaloran
16	Tuk Mulyo	Pandemulyo	Bulu
17	Wagir Bawang	Simper	Tretep
18	Prangkakan	Prangkakan	Bejen
19	Ngadimulyo	Ngadimulyo	Kedu
20	Muncar Moncer	Muncar	Gemawang
21	Bumi Makukuhan	Wonosari	Bulu
22	Petarangan	Petarangan	Kledung
23	Giripurno	Giripurno	Ngadirejo
24	Bansari	Bansari	Bansari
25	Gedongsari	Gedongsari	Jumo
26	Kaloran	Kaloran	Kaloran
27	Kembang Sari	Kembang Sari	Kandangan
28	Kampung Mbako	Tlilir	Tlogomulyo
29	Giyono	Giyono	Jumo
30	Gunung Gempol	Gunung Gempol	Jumo
31	Kledung	Kledung	Kledung

Sumber: Fatima (2025)

Kabupaten Temanggung tengah berupaya dalam memanfaatkan lokasinya untuk mengembangkan berbagai tujuan wisata berbasis desa dan alam. Tempat-tempat wisata yang terkenal di Temanggung antara lain Wisata Alam Posong, Wisata Air Pikatan Water Park, Sigandul View, Pasar Papringan, Mata Air Jumprit, Embung Kledung, dan Liyangan. Berdasarkan tempat wisata tersebut, Wisata Alam Posong dan Embung Kledung menerima jumlah wisatawan tertinggi, karena keduanya terletak di Kecamatan Kledung. Namun, seperti Desa Wisata Liyangan

di Desa Purbosari, khususnya di Dusun Liyangan, masih belum memiliki pengaruh yang signifikan di sektor pariwisata lokal (Wardoyo, 2023).

Dusun Liangan yang terletak di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, mendapat perhatian yang cukup besar, terutama dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, setelah ditemukannya cagar budaya Situs Liyangan pada saat kegiatan penambangan pasir. Fitur arsitektur situs ini menunjukkan bahwa situs ini berasal dari Kerajaan Mataram Kuno dan kemungkinan besar terkubur oleh letusan Gunung Sindoro di masa lalu, seperti yang ditunjukkan oleh temuan arang dan lokasinya yang berada di lereng gunung berapi. Meskipun Gunung Sindoro tidak aktif, bukti sejarah menunjukkan adanya letusan dahsyat yang pernah melanda situs ini. Menanggapi konflik dengan para penambang pasir lokal, yang mata pencahariannya bergantung pada penambangan, Balai Pelestarian Cagar Budaya turun tangan pada tahun 2010 dengan mengizinkan kegiatan penambangan berlanjut hanya sampai struktur budaya ditemukan. Pusat pelestarian ini juga mulai membebaskan lahan dan melakukan penggalian, dengan melibatkan penduduk setempat yang membentuk Tim Peduli Situs untuk mendukung upaya pelestarian. Penemuan situs pada tahun 2008 membawa optimisme bagi Dusun Liyangan, karena warga melihat potensi situs tersebut untuk meningkatkan ekonomi lokal. Untuk memanfaatkan hal ini, mereka membentuk Kelompok Sadar Wisata Liyangan, yang bertujuan untuk mengembangkan dusun tersebut menjadi desa wisata yang berpusat di sekitar Situs Liyangan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga untuk menciptakan kegiatan yang meningkatkan daya tarik situs bagi wisatawan (Wardoyo, 2023). Selain Situs Liyangan, Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Liyangan juga telah menginisiasi pengembangan destinasi wisata pelengkap, seperti Kolam Renang Cinta Liyangan dan Kampung Peradaban, untuk meningkatkan dan mendiversifikasi tawaran wisata desa tersebut.

Tabel 1. 3

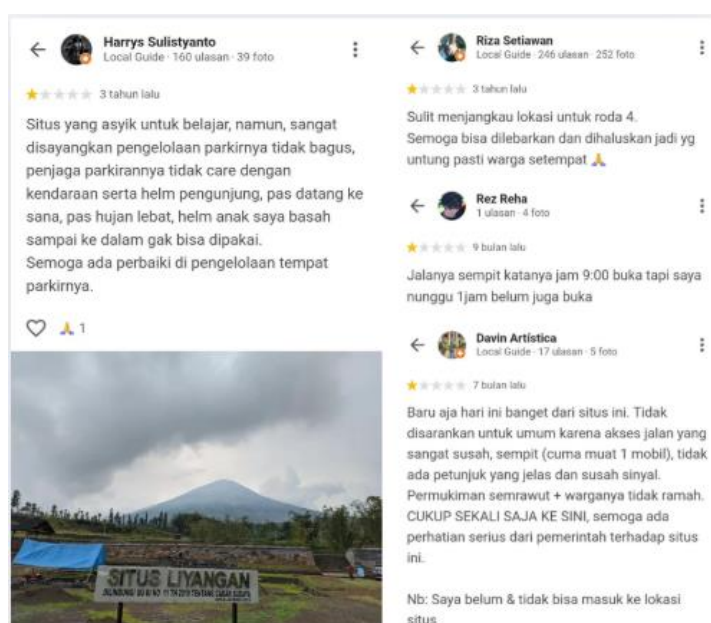
Jumlah Kunjungan Wisatawan di Destinasi Wisata Temanggung Tahun 2024

Nama Destinasi Wisata	Jumlah Kunjungan
Candi Pringapus	2.632
Embung Bansari	31.795
Embung Kledung	10.583
Kledung Park	2.776
Desa Wisata Liyangan	17.983
Pasar Papringan Ngadiprono	56.272
Pendakian Gunung Sindoro Via Kledung	14.549
Pikatan Water Park	103.714
Puncak Botorono	1.714
Rowo Gembongan	72.103
Sedadap	100
Sigandul View Coffee & Resto	76.084
Simpleng Water Park	33.632
Sindoro Water Park	10.243
Taman Posong	123.83
Tirto Asri	26.97
Umbul Jumpit	3.65
Wapit	9.932

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jateng (2024a)

Dari tabel 1.3, kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Liyangan pada tahun 2024 sejumlah 17.983 wisatawan. Angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan destinasi wisata populer lainnya di Kabupaten Temanggung. Kunjungan wisatawan di Taman Posong tercatat paling tinggi pada tahun 2024 hingga mencapai 123.83 wisatawan, diikuti oleh Pikatan Water Park mencapai 103.714

wisatawan, bahkan destinasi wisata lain seperti Sigandul View Coffee & Resto dan Rowo Gembongan masih memiliki jumlah wisatawan lebih dari 70.000 orang, yang tetap jauh lebih tinggi dibandingkan Desa Wisata Liyangan. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Wisata Liyangan belum mampu menarik banyak wisatawan dibandingkan dengan destinasi wisata lain di Kabupaten Temanggung. Guna meningkatkan daya saingnya, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tarik melalui berbagai strategi.



Gambar 1. 5 Keluhan Terhadap Desa Wisata Liyangan

Sumber: Google Review Situs Liyangan dan Kolam Renang Cinta Liyangan, (2025)

Berdasarkan ulasan dari para wisatawan, terdapat beberapa permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengelolaan Desa Wisata Liyangan. Permasalahan tersebut meliputi akses jalan menuju Desa Wisata Liyangan dinilai sangat sulit, sempit, dan tidak memiliki petunjuk arah yang jelas, sehingga menyulitkan wisatawan untuk berkunjung di destinasi tersebut. Selain itu, fasilitas parkir di Desa Wisata Liyangan yang kurang memadai, hal ini menjadikan

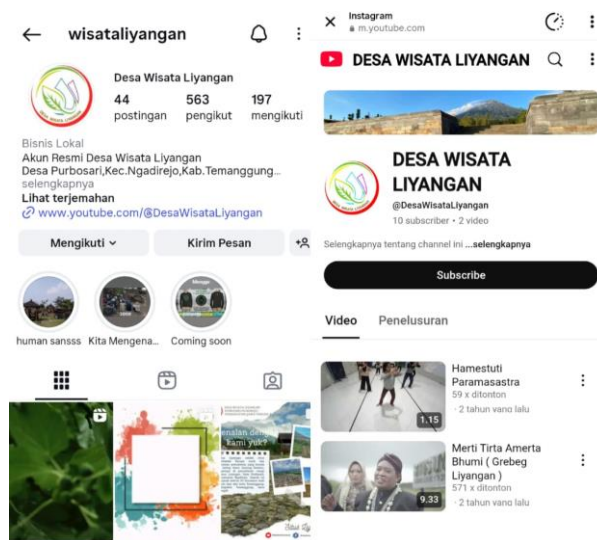
keluhan utama wisatawan, di mana dalam area parkir belum dikelola dengan baik, serta minimnya pengawasan oleh pengelola terhadap kendaraan dan barang pribadi wisatawan. Ketidaknyamanan ini semakin diperparah dengan kondisi di lingkungan sekitar Desa Wisata Liyangan yang dinilai masih semrawut dan kurangnya perhatian dari pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur dan sarana pendukung di Desa Wisata Liyangan.

Pengembangan pariwisata terhadap Desa Wisata Liyangan yang belum optimal juga karena kawasan desa wisata ini bukan merupakan kawasan pariwisata prioritas dan juga pada area Situs Liyangan belum ter-eks kavasi sepenuhnya, masih sekitar 75 - 80% dari total kawasan yang sudah diperkirakan. Sehingga hal ini berdampak pada pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana yang belum optimal guna menunjang pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan (Arini et al. 2024).

Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam pengembangan Desa Wisata Liyangan melalui berbagai macam bentuk pelatihan kepada pengelola Desa Wisata Liyangan seperti pengelolaan homestay, inovasi sajian kuliner, promosi, hingga fotografi. Meskipun telah terjalin kerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung, implementasi program seperti pelatihan belum memberikan dampak signifikan karena minimnya keterlibatan aktif masyarakat. Di sisi lain, terdapat pula permasalahan komunikasi dan koordinasi antara pengelola Desa Wisata Liyangan dengan pemerintah desa yang belum terjalin secara harmonis. Menurut Kepala Dusun Liyangan, pengelolaan masih terpusat pada kelompok tertentu, sehingga desa tidak memiliki

kewenangan penuh untuk turut mengembangkan destinasi wisata tersebut (Sujiyanto & Shintasiwi, 2024).

Permasalahan lain dalam pengembangan Desa Wisata Liyangan adalah belum optimalnya keterlibatan generasi muda yang justru memilih merantau dibanding berpartisipasi dalam mengembangkan potensi lokal, terutama dalam pemanfaatan teknologi. Akibatnya, inovasi dalam pengelolaan Desa Wisata cenderung stagnan dan didominasi oleh kalangan orang tua. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai Sapta Pesona, yang seharusnya menjadi fondasi kesadaran wisata. Warga cenderung hanya menunjukkan sikap sadar wisata ketika ada kunjungan penting, sementara dalam keseharian masih memperlihatkan perilaku yang kurang mendukung citra desa wisata (Ningsih & Wijaya, 2023).

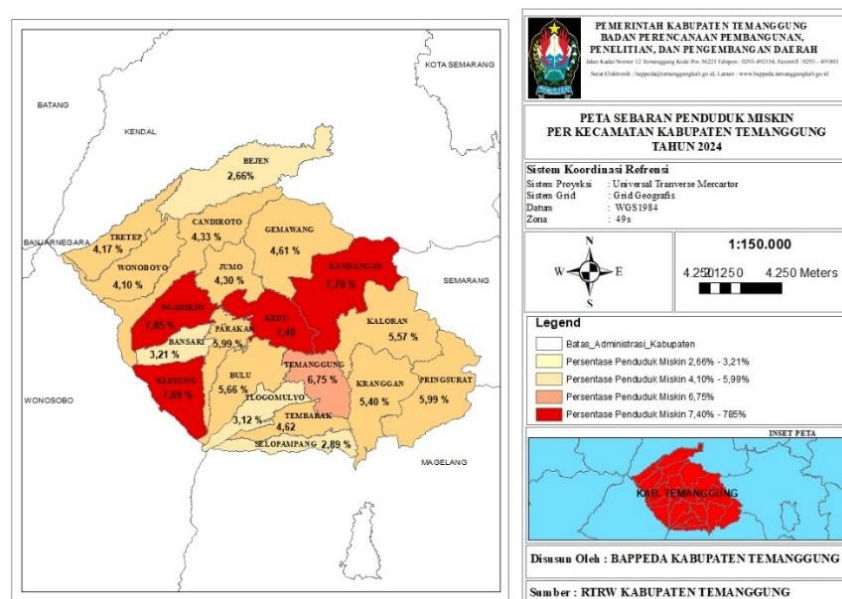


Gambar 1. 6 Media Sosial Desa Wisata Liyangan
Sumber: Media Sosial Desa Wisata Liyangan (2025)

Pengelolaan media sosial Desa Wisata Liyangan masih belum optimal, tercermin dari minimnya pemanfaatan akun Instagram dan YouTube yang menyediakan konten informatif atau promosi. Meskipun berpotensi sebagai

platform strategis untuk menyoroti destinasi wisata, kanal-kanal tersebut saat ini belum mampu menampilkan citra destinasi yang menarik bagi calon wisatawan, terutama karena produksi konten yang tidak teratur dan jeda pembaruan yang berkepanjangan sejak tahun 2023. Selain itu, masih terlihat minimnya platform media sosial khusus lainnya seperti Facebook atau TikTok yang dapat dimanfaatkan secara strategis untuk menonjolkan keunikan dan daya tarik visual Desa Wisata Liyangan. Minimnya pemanfaatan media digital ini menunjukkan kurangnya branding pariwisata desa dalam menjangkau khalayak yang lebih luas, khususnya di kalangan wisatawan muda yang melek teknologi.

Permasalahan-permasalahan tersebut, mencerminkan belum adanya kolaborasi yang kuat dan komitmen dari pokdarwis desa wisata, pemerintah, masyarakat setempat, swasta, dan pengelolaan media sosial. Hal ini menyoroti perlunya sinergi dan keberlanjutan yang lebih besar antar *stakeholders* untuk memastikan kesadaran pariwisata yang konsisten di Desa Wisata Liyangan.



Gambar 1. 7 Peta Sebaran Penduduk Miskin di Kabupaten Temanggung, 2024
Sumber: BAPPEDA Kabupaten Temanggung (2024)

Pemilihan lokus penelitian di Desa Wisata Liyangan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, didasarkan pada pertimbangan strategis dan relevansi isu pembangunan lokal. Kecamatan Ngadirejo merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, sehingga pengembangan desa wisata di kawasan ini seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor pariwisata. Keberadaan Situs Liyangan, Kolam Renang Cinta, dan Kampung Peradaban di Desa Wisata Liyangan sebagai destinasi alam dan budaya memiliki potensi ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara optimal. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan, terlihat dari masih rendahnya kontribusi desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengatasi permasalahan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah mengapa pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan, Kabupaten Temanggung belum terintegrasi dan berkelanjutan?

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, identifikasi masalah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Rendahnya Kunjungan Wisatawan dibandingkan dengan Destinasi Lain.
2. Aksesibilitas dan Infrastruktur yang Terbatas.
3. Pengelolaan wisata yang belum selesai dan kurangnya prioritas pengembangan.

4. Masih belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan Desa wisata.
5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pengelola dengan pemerintah.
6. Penggunaan media sosial belum optimal.
7. Belum terintegrasi dan keberlanjutannya *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan, Kabupaten Temanggung.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan?
2. Apa faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan?
3. Bagaimana model *helix* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan.
2. Menganalisis faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Menggambarkan model *helix* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.5. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya terkait pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu manajemen publik dan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan model *helix*.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan model *helix*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan pula memberikan sumbangan gagasan, ide-ide baru dan rekomendasi strategis bagi pemerintah, pembuat kebijakan serta pihak terkait dalam pengembangan desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapat informasi tentang desa wisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.6. Kajian Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun Terbit, Judul, Nama Jurnal	Teori Yang Digunakan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Cleodora Beatrice, Diana Hertati (2023) Model <i>Penta Helix</i> dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Manggarsari Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial	Menurut Sudiana et al. (2020) <i>Pentahelix</i> diartikan sebagai suatu kerjasama yang dilakukan antar <i>stakeholder</i> yang terdiri dari <i>Academic, Business, Government, Community, and Media</i> (ABGCM).	Kualitatif	Dalam pengembangan UMKM Manggarsari Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media yang memfasilitasi pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan, dukungan kebijakan, dan strategi pemasaran digital. Meskipun dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dalam menjalankan perannya.
2.	Rizki Hidayati, Tri Yuniningsih & Endang Larasati S (2023) <i>Helix Model in Tourism Development Based on Sustainable Tourism Development in the</i>	Konsep <i>helix</i> yang telah dikembangkan: a. <i>Triplehelix</i> b. <i>Quadruplehelix</i> c. <i>Pentahelix</i> d. <i>Hexahelix</i>	Kualitatif	Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Nongkosawit belum menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. <i>Stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit dikelompokkan menjadi 3, yakni <i>stakeholder</i> primer, sekunder, dan kunci yang kemudian membentuk model <i>Penta helix</i> . Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor yang dianggap

	<i>Nongkosawit Tourism Village, Semarang City</i> PERSPECTIVE	Pembangunan berkelanjutan terdiri dari dimensi: - Ekonomi - lingkungan - sosial budaya.		menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit.
3.	Randitha Missouri , Zumhur Alamin, Ulil Azmin (2021) Penerapan Model <i>Triple Helix</i> Dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Masyarakat Kelurahan Rabangodu Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Jurnal Ekonomi Syariah	Menurut Etzkowitz (1997) <i>triplehelix</i> adalah bersinerginya 3 aktor sebagai sebuah penggerak pengembangan ekonomi kreatif. <i>Triplehelix</i> adalah sinergi kekuatan antara: - akademisi - bisnis - pemerintah.	Kualitatif	Temuan dari penelitian ini adalah model <i>triplehelix</i> belum mampu dalam meningkatkan minat berwirausaha warga kelurahan Rabangodu Selatan pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari tiga faktor, yaitu: (1) <i>factor personal</i>, (2) <i>factor environment</i>, (3) <i>factor sociological</i>.
4.	Hamzanwadi Huzain Jailani, Muhammad Rafii (2023) Implementasi <i>Triple Helix Of Economic Education Terintegrasi Sustainable Development Goals (SDGS)</i> Untuk Meningkatkan <i>Hardskill</i> Dan <i>Softskill</i> Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Berbasis	Menurut Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), <i>Triple Helix</i> hubungan dari: - Universitas - Industri - Pemerintah	Kualitatif	Temuan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan <i>triple helix</i> pendidikan ekonomi terintegrasi dengan <i>sustainable development goals</i> dapat meningkatkan <i>softskill</i> dan <i>hardskill</i> yang sesuai dengan konsep Kampus Merdeka. Mahasiswa diberikan tantangan dan kesempatan guna mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui realitas dan dinamika lapangan seperti tuntutan kemampuan, tuntutan kinerja, kesamaan yang nyata, interaksi

	Kampus Merdeka Di Universitas JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)			sosial, manajemen diri, kolaborasi, target dan prestasinya.
5.	Muhammad Tahwin; Anik Nurhidayati; Dian Ayu Liana Dewi (2022) <i>QUADRUPLE HELIX AS A DEVELOPMENT INDUSTRY MODEL OF BATIK TULIS LASEM REMBANG REGENCY</i> Jurnal Ilmiah Ekonomi	Konsep <i>Quadruple Helix</i> merupakan pengembangan konsep <i>Triple Helix</i> dengan mengintegrasikan peran (1) akademisi, (2) bisnis, (3) pemerintah, dan (4) masyarakat ke dalam aktivitas kreativitas dan pengetahuan (Oscar, 2010).	Kualitatif	Temuan dari penelitian ini adalah bahwa strategi pengembangan industri Batik Tulis Lasem yang paling tepat adalah kombinasi strategi Strengths-Opportunities (SO) berdasarkan analisis SWOT. Terdapat 10 strategi utama, di antaranya: implementasi regulasi pelestarian batik, optimalisasi kajian dan penelitian, peningkatan event pecinta batik, pembaruan desain, peningkatan fasilitas, pemanfaatan pinjaman usaha, serta penguatan koperasi dan klaster batik oleh pemerintah. Keseluruhan strategi tersebut dirumuskan dalam konsep model <i>Quadruple Helix</i> untuk mendukung pengembangan industri Batik Lasem secara berkelanjutan.
6.	Philianto Dani Rahu, Suprayitno (2021) KOLABORASI MODEL <i>PENTA HELIX</i> DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA SEI GOHONG	Strategi <i>Pentahelix</i> : ABCGM (Academic, Business, Community, Government and Media).	Kualitatif	Kolaborasi dalam model <i>Pentahelix</i> untuk mengembangkan Desa Wisata Sei Gohong, Kota Palangka Raya belum optimal. Kerja sama para pemangku kepentingan masih lemah, dengan sedikit saling ketergantungan dan kurangnya dialog konstruktif yang terpadu karena pertemuan yang jarang dan tidak terjadwal. Akibatnya, keputusan

	KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan			bersama seperti yang dibuat dalam Musrenbang tidak sepenuhnya didasarkan pada konsensus bersama. Selain itu, tanggung jawab bersama terhambat oleh tidak adanya perjanjian hukum yang mengikat atau nota kesepahaman (MoU).
7.	Ida Bagus Ketut Soma Antara, Nyoman Agus Tri Mandala (2023) Analisis Penerapan Konsep <i>Quality Tourism</i> di Bali dari Sudut Pandang Sinergitas <i>Penta Helix</i> Pariwisata JURNAL MANAJEMEN PERHOTELAN DAN PARIWISATA	Konsep <i>Penta Helix</i> : 1. <i>Academic</i> , 2. <i>Business</i> , 3. <i>Community</i> , 4. <i>Government</i> , dan 5. <i>Media</i>	Kualitatif	Temuan di lapangan menunjukkan, secara ekonomi pariwisata di Bali telah berdampak bagi masyarakat lokal meskipun masih perlu pemerataan. Secara sosial dan budaya, adanya pariwisata memberikan kesempatan guna penguatan sejumlah potensi lokal dengan peran pemangku kebijakan. Selain itu, dektor pariwisata juga menjadi pemicu pembangunan infrastruktur dan lembaga pendidikan pariwisata di Bali yang memberikan peran penting dalam peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
8.	Mohammad Abram Maulana, Istijabatul Aliyah, R. Chrisna Trie Hadi Permana (2023) Kajian Keberlanjutan Lingkungan Di Kawasan Mandalika Ditinjau Dari Konsep Pariwisata Berkelanjutan	4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan kawasan wisata berkelanjutan sesuai ide Muller, yaitu. 1. Perkembangan dampak ekonomi yang sehat 2. Aksi nyata pemerintah untuk merangkul masyarakat lokal	Kualitatif	Meskipun perlindungan kawasan lindung dan kawasan budidaya sudah seimbang, namun masih belum merata. Banjir telah meningkat selama lima tahun terakhir. Lebih lanjut, konservasi energi dan pengembangan transportasi ramah lingkungan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan kawasan.

	Cakra Wisata	3. Tidak mengubah konstruksi alam secara berlebihan 4. Mempertahankan kearifan budaya komunitas		
9.	Ida Ayu Putu Widiati dan Indah Permatasari (2022) Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (<i>Sustainable Tourism Development</i>) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa	Prinsip keberlanjutan menurut Organisasi Pariwisata Dunia (2005), mengacu pada: 1. lingkungan, 2. ekonomi dan sosial budaya, dan 3. keseimbangan yang tepat	Kualitatif	Pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan aspek jangka panjang dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan, di mana pemerintah berperan strategis dalam merumuskan kebijakan melalui rencana induk di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Nilai filosofi Tri Hita Karana menjadi landasan dalam kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata berbasis lingkungan, termasuk memastikan pembangunan sesuai peruntukannya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata.
10.	Mutiara Lisa Allokendek, Dwight Moody Rondonuwu, Rieneke Evani Sela (2024) Kajian Awal Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Perkotaan Manado	Melalui pendekatan yang terintegrasi, pariwisata di wilayah pesisir Kota Manado dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan (1) aspek ekologi, (2) sosial, dan (3) ekonomi, sehingga menghasilkan manfaat yang	Kualitatif	Temuan penelitian diketahui terdapat tiga bentuk pariwisata, yaitu: (1) wisata alam yang memanfaatkan potensi sumber daya alam; (2) wisata buatan yang memanfaatkan produk/desain manusia untuk kegiatan rekreasi dan hiburan; dan (3) wisata budaya yang timbul dari aktivitas masyarakat atau suku di permukiman nelayan pesisir yang harus dilestarikan. Integrasi pembangunan berkelanjutan

	Journal of Marine Research	optimal bagi masyarakat kota dan lokal serta kelestarian alam (Achmad et al. 2024).		berbasis aspek ekonomi, sosial, dan budaya diperlukan untuk menjamin keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir perkotaan.
11.	Widya Silviana, Adil Mubarak (2020) Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan pada objek wisata Pantai Carocok Painan Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik	Menurut penelitian Gamal Suwantoro terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi perkembangan pariwisata, yaitu 1. Objek & daya tarik wisata 2. Infrastruktur pariwisata 3. Fasilitas perjalanan 4. Tata kelola (infrastruktur) 5. Komunitas (lingkungan)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dapat dikatakan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan di pesisir Carocok Painan berjalan sangat lancar. Meskipun dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan masih terdapat kekurangan dan kendala.
12.	Rindang Alfiah, Cindy Monica Febrian, Ratih Novi Listyawati, RR Dewi Junita Koesoemawati (2025) <i>PENTA HELIX APPROACH FOR ACHIEVING INTEGRATED AND SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT</i> <i>International Journal of Educational Review, Law And</i>	Aspek Pengembangan Pariwisata Terintegrasi: 1. Kedekatan Geografis 2. Atraksi Wisata 3. Aksesibilitas 4. Fasilitas Pendukung 5. Elemen Kelembagaan 6. Direksi Aspek Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: 1. Manajemen Keberlanjutan	Kualitatif	Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan di Desa Sumbermujur sudah memiliki kondisi yang cukup baik dengan berbagai fasilitas pendukung, namun masih memerlukan perbaikan pada infrastruktur jalan, transportasi wisata, dan sistem pengelolaan sampah. Analisis Delphi menunjukkan bahwa seluruh indikator dalam variabel pariwisata terpadu dan berkelanjutan telah disepakati oleh responden, meskipun masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, seperti atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, elemen kelembagaan, dan kelestarian lingkungan. Terdapat empat pemangku kepentingan yang telah

	<i>Social Sciences (IJERLAS Journal)</i>	2. Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial 3. Kelestarian Budaya 4. Kelestarian Lingkungan		berkolaborasi yang meliputi akademisi, masyarakat lokal, pemerintah, dan media. Bisnis swasta di sektor pariwisata belum terlibat dalam kerjasama yang ada.
13.	Nur Fadisa, Syamsurizaldi, Hendri Koeswara (2022) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau Di Kota Bukittinggi Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan	Pembangunan pariwisata berkelanjutan menggunakan teori Swarbrooke yang melihat dari: 1. lingkungan, 2. ekonomi, dan 3. sosial.	Kualitatif	Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kawasan Geopark Ngarai Sianok Kota Bukittinggi mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan berdampak positif terhadap sektor pariwisata, termasuk peningkatan PAD setiap tahun. Pengembangan kawasan ini belum berdampak signifikan terhadap ekosistem lingkungan. Peneliti menyarankan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan wisata, serta pengembangan ke depan agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan Geopark Sianok Maninjau.
14.	Ryan Adhinugraha Wardoyo (2023) Pengembangan Desa Wisata Studi Kasus Situs Liyangan Desa Wisata Liangan, Syntax Idea	Identifikasi Dampak: 1. Sosial 2. Budaya 3. Ekonomi 4. Lingkungan	Kualitatif	Pengembangan Desa Wisata Liangan belum optimal karena Situs Liyangan belum memiliki tiket masuk, sehingga warga enggan memanfaatkan paket wisata sebagai sumber pendapatan dan beralih ke pertanian. Padahal, Situs Liyangan merupakan situs cagar budaya yang cukup lengkap, dengan candi, tempat pemandian (batur), tempat pemandian (batan), dinding penahan (talud), tangga, jalan kuno, dan lahan pertanian kuno. Namun, belum adanya pengakuan resmi sebagai destinasi wisata menjadi kendala utama bagi pengembangan desa wisata ini.

15.	Kaltsum Hana Arini, Chatarina Muryani¹, Rahning Utomowati (2024) Analisis Potensi Wisata Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Arah Pengembangan Desa Wisata Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Indonesian Journal of Environment and Disaster	Faktor yang mempengaruhi tingkat pariwisata: 1. sumber daya yang diberikan, 2. sumber daya yang diciptakan, 3. faktor pendukung, 4. pengelolaan destinasi, 5. kondisi situasional, dan 6. kondisi permintaan.	Kualitatif	Desa Wisata Purbosari memiliki tiga jenis tingkat potensi wisata yaitu rendah, sedang dan tinggi. Partisipasi masyarakat di Desa Purbosari memiliki tingkat partisipasi/non partisipasi rendah dengan kategori terapi/partisipasi terapi untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan serta tingkat partisipasi/tokenisme sedang dengan kategori partisipasi penempatan/placation untuk tahap monitoring dan evaluasi. Metode SAST menghasilkan 20 asumsi <i>stakeholder</i> untuk arahan pengembangan desa wisata pada kuadran II, III dan IV.
16.	N Riana and K Fajri (2024). <i>Community empowerment in developing integrated tourism potentials at cimincrang sub-district, bandung, west java, indonesia.</i> <i>IOP Conference Series.Earth and Environmental Science</i>	Dalam Charter <i>for Sustainable Tourism</i> 1995, bahwa pembangunan pariwisata harus berlandaskan pada kriteria keberlanjutan, yaitu berdaya guna secara: 1. ekologis 2. ekonomis, 3. adil secara etika 4. sosial bagi masyarakat.	Kualitatif	Masih ditemukan kendala dalam penerapan Community Based Tourism di Cimincrang, yaitu kurangnya kapabilitas sumber daya manusia pariwisata dan kurangnya sinergi antar <i>stakeholder</i> pariwisata.
17.	Abd. Rachim, Prof. Dr. Yopie Warella, Dr. Retno Sunu Astuti, Dr. Suharyanto (2020)	Konsep baru <i>stakeholder Hexa Helix</i> terdiri dari 6 (enam) aktor, yaitu:	Kualitatif	Masyarakat terdampak merupakan bagian penting dari tahapan penanggulangan bencana. Masyarakat terdampak yang selama ini menjadi objek bencana,

	<i>Hexa Helix: Stakeholder model in the management of Floodplain of lake Tempe</i> <i>Prizren Social Science Journal</i>	(1) pemerintah; (2) dunia usaha; (3) perguruan tinggi; (4) LSM; (5) media massa; dan (6) masyarakat terdampak.		seharusnya menjadi subjek penanggulangan bencana. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah konsep lima pemangku kepentingan dalam <i>Penta Helix</i> belum memadai dalam penanggulangan bencana. Masyarakat terdampak layak ditempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan, di samping pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, media massa.
18.	Kenneth Nordberg, Åge Mariussen, Seija Virkkala (2020) <i>Community-driven social innovation and quadruple helix coordination in rural development. Case study on LEADER group Aktion Österbotten</i> <i>Journal of Rural Studies</i>	<i>Model Triple Helix</i> (Etzkowitz dan Leydesdorff, 2000) digunakan untuk menggambarkan interaksi dinamis antara universitas, perusahaan, dan organisasi publik serta kesinambungan kelembagaan, karena heliks ini terdiri dari lembaga-lembaga historis dengan lingkungan atau aturan seleksi. Model QH yang keempat dan khususnya <i>Social innovations</i> (SIs) berbasis komunitas QH.	Kualitatif	Program LEADER memperkuat daya tarik masyarakat dengan mempromosikan identitas lokal melalui berbagai acara kolektif seperti kegiatan budaya, olahraga, dan pertemuan berbasis alam. Prakarsa-prakarsa ini sering kali mengarah pada kewirausahaan di bidang pariwisata dan solusi sosial yang inovatif, dengan keterlibatan masyarakat lokal sebagai kunci keberhasilan. Dengan memadukan inovasi sosial (SI) dengan model <i>quadruple helix</i> (QH), studi ini menyoroti peran penting masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Pendekatan ini, yang disebut model QH yang digerakkan oleh masyarakat, menekankan kolaborasi antara pelaku lokal dan eksternal untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
19.	Christiane Gebhardt , Mariza Almeida , Henry Etzkowitz (2022)	<i>Triple Helix</i> terdiri dari (Etzkowitz, 2012; Ruhrmann et al. 2021):	Kualitatif	Pembentukan kawasan lindung membutuhkan partisipasi para pemangku kepentingan untuk yang muncul antara kebutuhan sosial yang beragam dan

	<i>Triple Helix Twins: Operationalizing the Sustainability Agenda in the Northern Black Forest National Park in Germany</i> <i>Triple Helix</i>	1. universitas, 2. industri, dan 3. pemerintah		pengetahuan ahli yang berbasis sains dan pengetahuan ahli. Temuan ini berkontribusi pada operasionalisasi model <i>Triple Helix</i> Kembar (THT) untuk menganalisis dampak kebijakan dan tata kelola transformasional.
20.	T Kartika E Edison, and E Maryani (2024) <i>Tourism village development for sustainable tourism in West Java-Indonesia (hexa helix tourism collaboration perspective)</i> <i>International Conference on Responsible Tourism and Hospitality (ICRTH)</i>	Menurut An (2012), konsep pariwisata berkelanjutan mencakup beberapa aspek penting, termasuk: 1. Konservasi Alam dan Lingkungan 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan 3. Pelestarian Budaya dan Warisan 4. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat	Kualitatif	Pendekatan <i>Hexa Helix</i> yang melibatkan enam sektor, yaitu sektor pemerintah, bisnis, akademisi, komunitas, media, dan wisatawan sangat penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Rekomendasi strategis yang dihasilkan antara lain perlunya kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata, penguatan peran masing-masing sektor. <i>Hexa Helix</i> melalui integrasi program yang mendukung pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, dan perlunya program pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata khususnya di desa wisata.

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

Tabel penelitian terdahulu di atas, menyoroti bahwa model *helix* telah diimplementasikan di beberapa pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan negara-negara lain. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi pemangku kepentingan dalam kegiatan dan program pariwisata memainkan peran penting dalam pengembangan sektor ini.

Menurut Antara dan Mandala (2023) dalam penelitiannya tentang implementasi pariwisata berkualitas di Bali melalui lensa sinergi *Pentahelix*. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun pariwisata telah memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal secara ekonomi, masih ada kebutuhan untuk pemerataan ekonomi yang lebih besar. Secara sosial budaya, pariwisata telah memperkuat potensi lokal dengan partisipasi para pembuat kebijakan. Selain itu, sektor pariwisata telah berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan lembaga pendidikan di bidang pariwisata yang memainkan peran penting dalam meningkatkan sumber daya manusia di sektor pariwisata Bali.

Selanjutnya penelitian oleh Hidayati et al. (2023) yang meneliti Model *Helix* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Nongkosawit, Kota Semarang. Penelitian mereka menemukan bahwa meskipun aspek sosial dan lingkungan dari pariwisata di Nongkosawit relatif optimal, manfaat ekonomi belum maksimal. Studi ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada keterlibatan pemangku kepentingan yang membentuk model *Pentahelix*, prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan belum sepenuhnya diterapkan. Beberapa faktor pendukung dan penghambat telah diidentifikasi, menyoroti tantangan dalam mencapai pembangunan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.

Penelitian lain oleh Alfiah et al. (2025) berfokus pada model *Pentahelix* untuk mencapai pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan di Desa Sumbermujur. Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun desa ini memiliki infrastruktur pariwisata yang relatif kuat, masih ada tantangan dalam infrastruktur jalan, transportasi pariwisata, dan pengelolaan limbah. Analisis Delphi mengkonfirmasi bahwa semua variabel yang terkait dengan pariwisata terpadu dan berkelanjutan disetujui oleh responden. Namun, beberapa aspek, seperti daya tarik pariwisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, struktur kelembagaan, dan kelestarian lingkungan, masih perlu ditingkatkan. Selain itu, meskipun berbagai pemangku kepentingan telah berkolaborasi di Sumbermujur yang meliputi akademisi, masyarakat lokal, pemerintah, dan media.; namun sektor swasta belum sepenuhnya terlibat dalam kerja sama yang ada, sehingga membatasi dampak ekonomi pariwisata secara keseluruhan.

Dari temuan studi sebelumnya, beberapa isu utama muncul. Pertama, manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata masih belum terdistribusi secara merata, sehingga masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan pariwisata. Kedua, prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan belum diimplementasikan secara optimal, sehingga masih terdapat kesenjangan dalam aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ketiga, meskipun ada kolaborasi antar pemangku kepentingan, kemitraan sering kali tidak melibatkan sektor-sektor penting seperti sektor swasta, sehingga mengurangi efektivitas strategi pengembangan pariwisata. Terakhir, infrastruktur dan fasilitas pendukung masih

memerlukan perbaikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pengalaman pariwisata.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul “Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Liyangan, Kabupaten Temanggung yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, terletak pada fokus penelitian yang dilakukan di Desa Wisata Liyangan. Jika penelitian-penelitian sebelumnya mengeksplorasi pendekatan model *helix* di berbagai daerah, penelitian ini secara khusus mengkaji mengenai Model *Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai model *helix* dalam pengembangan pariwisata, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis model *Pentahelix* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

1.6.2 Kajian Pustaka

1.6.2.1 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata mendasar yaitu “administrasi” dan “publik”. Menurut Siagian dalam Yuniningsih (2025) administrasi merujuk pada suatu usaha kerjasama antara dua orang atau lebih individu yang menganut prinsip-prinsip rasional dan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, istilah “publik” didefinisikan oleh Jefkins dalam Yuniningsih (2025) bahwa publik merujuk pada sekelompok individu yang terlibat dalam komunikasi atau interaksi di dalam suatu organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Secara umum,

konsep administrasi publik mencakup makna yang komprehensif dan luas yang mencerminkan sifatnya yang beraneka makna dalam tata kelola pemerintahan dan manajemen organisasi publik. Lebih lanjut, menurut Ibrahim dalam Widanti (2022 : 24), administrasi publik merupakan segala upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang didukung oleh suatu mekanisme kerja dan sumber daya manusia yang terstruktur.

Menurut Keban dalam Qomariyah (2024 : 56), administrasi publik sebagai gambaran bagaimana pemerintah bertindak sebagai otoritas yang berkuasa atau regulator utama. Dalam perspektif ini, pemerintah berperan aktif dan selalu berinisiatif dalam memprakarsai dan mengimplementasikan peraturan atau tindakan yang mereka anggap bermanfaat atau penting bagi warga karena warga masyarakat dianggap sebagai pihak pasif yang harus mematuhi arahan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah upaya kerja sama individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan publik.

1.6.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Adanya perubahan dan perkembangan dalam disiplin ilmu tercermin dalam pergeseran paradigma. Menurut Kuhn dalam Yuniningsih (2025), paradigma mencakup metodologi, nilai-nilai, prinsip-prinsip dasar, dan pendekatan dalam memecahkan masalah yang dianut oleh suatu kelompok selama periode tertentu. Ketika kepercayaan yang berlaku dalam suatu komunitas menghadapi krisis atau

anomali, sehingga mendorong mereka untuk mencari kebutuhan akan kerangka kerja baru yang lebih sesuai atau dengan kata lain mencari paradigma baru.

Administrasi publik tidak dapat terlepas dari dampak perubahan lingkungan, terutama kemajuan teknologi. Administrasi publik dituntut untuk senantiasa beradaptasi dengan paradigma yang dianutnya, sehingga mampu mereformasi dirinya sejalan dengan paradigma *good governance* yang dituntut oleh masyarakat. Tokoh terkenal dalam studi paradigma administrasi publik adalah Nicholas Henry, yang pada awalnya mengidentifikasi lima paradigma pada tahun 1970-an. Namun, pada tahun 2018, Nicholas Henry merevisi bukunya dan memperkenalkan paradigma baru hingga saat ini jumlahnya terdapat 6 paradigma (Muluk dalam Yuniningsih (2025):

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pada paradigma pertama, kebijakan yang mewujudkan kehendak atau kemauan rakyat merupakan pusat dari ranah politik. Perbedaan antara politik dan administrasi terlihat jelas dalam pembagian tugas, di mana badan legislatif mewakili kepentingan publik, sementara badan eksekutif bertanggung jawab atas implementasi kebijakan. Dalam periode ini, administrasi publik mulai membangun legitimasi akademiknya, terutama setelah penerbitan karya Leonard D. White yang berpengaruh, "*Introduction to the Study of Public Administration*" pada 1926 yang berpendapat bahwa politik seharusnya tetap terpisah dari administrasi dan administrasi publik harus diakui sebagai disiplin ilmu yang mampu bersikap objektif dan bebas nilai (Qomariyah, 2024 : 107).

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937).

Pada paradigma kedua, pengembangan ilmu administrasi negara secara inheren berkaitan dengan prinsip-prinsip administrasi yang dianggap dapat bersifat universal, baik pemerintahan maupun bisnis (Qomariyah, 2024 : 111). Prinsip-prinsip ini termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia, pengarahan, koordinasi, pelaporan dan penganggaran.

3. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada paradigma ini, administrasi publik yang berfokus pada aspek politik tidak hanya menggeser paradigma yang ada, tetapi juga mendorong integrasi perspektif baru dan pendekatan yang komprehensif, sehingga membutuhkan pengembangan kerangka kerja konseptual dan metodologi yang dapat beradaptasi dengan dinamika masyarakat dan kompleksitas politik (Qomariyah, 2024 : 113). Pada tahap ini, administrasi publik dianggap sebagai bagian atau cabang dari ilmu politik yang mengarah pada perspektif bahwa administrasi publik merupakan komponen penting dari disiplin ilmu tersebut. Namun, era ini dianggap bahwa administrasi publik telah kehilangan identitasnya karena keterkaitannya yang erat dengan ilmu politik.

4. Paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Menurut Akib dalam (Qomariyah, 2024 : 118) menyatakan bahwa pada masa ini istilah “ilmu administrasi” dipahami mencakup seluruh kajian yang berhubungan dengan teori organisasi dan manajemen. Pada paradigma ini,

prinsip-prinsip manajemen yang telah berkembang mulai dikaji dan diimplementasikan menggunakan pendekatan yang lebih ilmiah. Paradigma ini berkembang dalam dua arah utama: pertama, administrasi negara yang mengintegrasikan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi sosial; dan kedua, administrasi yang menempatkan penekanan lebih besar pada kebijakan publik.

5. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970-an)

Paradigma kelima menetapkan batasan-batasan yang jelas dalam teori administrasi negara, dengan menyoroti teori manajemen, teori organisasi dan kebijakan publik. Sementara itu, fokus utama dari administrasi publik adalah pada isu-isu publik. Sejalan dengan pandangan ini, Stephen K. Bailey dalam (Qomariyah, 2024 : 120) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam studi administrasi publik: pertama, perilaku organisasi dan perilaku anggota organisasi publik; kedua, teknik manajemen; dan ketiga, kepentingan publik, yang terkait erat dengan isu-isu sosial, waktu, dan kebijakan publik.

6. Paradigma Administrasi Publik sebagai *Governance* (1990-sekarang)

Paradigma keenam menitikberatkan pada peran administrasi publik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pemerintahan yang demokratis harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan otoritas untuk mewujudkan *good governance*. Paradigma ini mendorong otonomi manajerial yang lebih besar, terutama dengan meminimalkan campur tangan pemerintah pusat dalam mekanisme

control. Kekuasaan tidak lagi hanya terkonsentrasi di dalam pemerintah tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai pemegang kendali utama. Tata kelola pemerintahan yang baik dibangun di atas hubungan yang seimbang di antara tiga elemen penting yang meliputi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta yang harus berjalan secara harmonis, selaras, dan seimbang (Qomariyah, 2024 : 129).

Berdasarkan paradigma di atas, paradigma yang sesuai dengan penelitian ini yaitu paradigma keenam yang disebut juga paradigma *governance*. Dalam konteks ini, *governance* atau tata kelola pemerintahan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola layanan publik, termasuk penyediaan layanan publik dan hubungan dengan pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Governance* yang efektif membutuhkan partisipasi aktif dari warga negara, kelompok masyarakat, kemitraan antara pemerintah dengan swasta, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintah, dan badan-badan pemerintahan lainnya. Melalui kolaborasi ini, tata kelola pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif, memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik.

1.6.2.3. Manajemen Publik

Konsep manajemen publik sebenarnya lebih menitikberatkan pada aspek implementasi, yang mencakup penerapan teori, model, teknik, metode, dan pendekatan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang efisien dan efektif (Firdausijah et al. dalam Qomariyah, 2024 : 190).

Menurut Shafritz dan Russel dalam Qomariyah (2024 : 190), manajemen publik adalah suatu usaha seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun mesin untuk mencapai tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Nor Ghofur dalam Qomariyah (2024 : 190) menyatakan manajemen publik sebagai manajemen pemerintah yang menekankan bahwa dalam manajemen publik juga melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pelayanan kepada masyarakat.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Overman, sebagaimana dikutip dalam Yuniningsih (2025), manajemen publik adalah sebuah bidang indisipliner yang mencakup aspek-aspek organisasi secara umum dan mengintegrasikan berbagai fungsi manajemen, yang biasa dikenal dengan istilah POAC (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Fungsi-fungsi ini melibatkan elemen-elemen kunci seperti sumber daya manusia, informasi, keuangan, dan politik.

Menurut Wilson dalam Yuniningsih (2025) berpendapat bahwa terdapat empat studi administrasi publik yang ada di dalam manajemen publik hingga sekarang yaitu:

1. Pemerintah sebagai *setting* utama di dalam sebuah organisasi
2. Eksekutif menjadi fungsi utama
3. Pencarian prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif merupakan kunci dari pengembangan kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan bidang administrasi publik.

Konsep manajemen publik adalah suatu bidang studi yang dibangun di atas berbagai disiplin ilmu. Artinya, keberadaan manajemen publik sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kontribusi disiplin ilmu lain, termasuk ilmu administrasi publik, manajemen, ilmu politik, kebijakan publik, dan lain-lain. Perpaduan berbagai disiplin ilmu inilah yang mendorong lahirnya studi manajemen publik. (Qomariyah, 2024 : 190).

Paradigma manajemen publik mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman yang berawal dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang mengalami perkembangan menjadi paradigma *New Public Management* (NPM), kemudian *government*, dan pada akhirnya menjadi paradigma *governance*. Adanya pergeseran paradigma menyebabkan lahirnya istilah baru yaitu kolaborasi antar *stakeholder*. Selain pemerintah kolaborasi ini melibatkan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di publik (Tilano & Suwitri dalam Yuniningsih, 2025).

Terkait dengan paparan *governance* sebagai *networks* dalam hubungannya dengan kemitraan, Loffler dan Bovaird dalam Yuniningsih (2025) berpendapat bahwa terdapat beberapa makna dari *governance*. Pertama, cara para *stakeholder* berinteraksi antara satu dengan yang lain guna mempengaruhi hasil kebijakan. Kedua, struktur yang muncul dalam sistem sosial politik sebagai keluaran bersama atau hasil dari upaya intervensi-interaksi seluruh *stakeholder*. Ketiga, koordinasi secara formal dan informal antara publik dan *privat*. Keempat, konsep atau teori yang mencerminkan koordinasi suatu sistem sosial dengan peran negara di

dalamnya. Lebih lanjut, Loffer dan Bovaird dalam Yuniningsih, 2025), juga menyatakan bahwa elemen krusial dalam *governance* berkaitan dengan skenario dari berbagai *stakeholder* ketika masalah kolektif tidak dapat dipecahkan hanya oleh otoritas publik. Dalam hal ini, dibutuhkan suatu kerja sama *stakeholder* lain (bisnis, warga masyarakat, LSM) dengan cara arbitrase, mediasi, dan *self regulation* yang lebih efektif dibandingkan tindakan langsung oleh pemerintah.

Fadhly dalam Qomariyah (2024 : 188) mengemukakan Teori Manajemen Publik dengan menyoroti tujuh ciri khas manajemen sektor publik yang membedakannya dari sektor swasta. Manajemen sektor publik dicirikan oleh berorientasi pada kepentingan publik, alokasi sumber daya berdasarkan urgensi, terbuka kepada masyarakat dalam memberikan informasi, tidak mencari keuntungan, akses yang sama terhadap layanan dasar, dan tidak berbasis pasar. Dengan demikian, manajemen publik menekankan penggunaan alat-alat manajemen dalam memberikan pelayanan kepada publik untuk memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat umum.

Teori Manajemen Publik telah mengalami perkembangan. Dalam konteks *New Public Management* (NPM), manajemen publik lebih menekankan pada perlunya memberikan dasar motivasi dan argumen yang logis dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, NPM juga menyoroti kontribusi manajemen publik dalam membangun kesepahaman dan berbagai gagasan terkait kepentingan publik. Pendekatannya bukan hanya tentang menemukan solusi cepat dari pilihan individu, tetapi juga menciptakan pembagian tanggung jawab dan kepentingan yang lebih luas. Dalam konteks ini, Fadel Muhammad *Resource Center* (2014) dan

para ahli lainnya menekankan pentingnya manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat (Yuniningsih, 2025).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik adalah suatu proses yang di dalamnya terdapat upaya yang berfokus pada organisasi pemerintah yang bertanggung jawab dengan mengoptimalkan sumber daya dan mengintegrasikan fungsi-fungsi utama seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pengarahan, dan pengendalian untuk memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

1.6.2.4. Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang secara langsung melibatkan masyarakat lokal, sehingga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungannya (Rahayu & Saragih, 2022 : 1). Menurut Kodhyat dalam Rahayu & Saragih (2022 : 3), pariwisata merupakan perjalanan sementara dari suatu lokasi ke lokasi lain, dilakukan perorangan atau kelompok guna mencari keserasian, keseimbangan, dan kebahagiaan dalam aspek alam, budaya, sosial, dan ilmu.

Sementara itu, menurut McIntosh & Gupta dalam Rahayu & Saragih (2022 : 4) mendefinisikan pariwisata sebagai interaksi dinamis antara bisnis, wisatawan, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal, yang muncul dalam proses menarik dan mengakomodasi wisatawan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dijelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan

kepariwisataan adalah seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud sebuah kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bisnis. Pariwisata telah menjadi bagian integral dari pembangunan suatu negara, bahkan suatu negara lebih terkenal karena melalui daya tarik destinasi wisatanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah perjalanan sementara waktu yang dilakukan dari suatu tempat ketempat lainnya dengan tujuan rekreasi atau berwisata.

Menurut Suwena dan Widyatmaja dalam Yuniningsih (2025) menguraikan beberapa kriteria atau karakteristik perjalanan pariwisata, antara lain:

1. Perjalanan dilakukan untuk jangka waktu sementara.
2. Melibatkan perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lain.
3. Perjalanan harus selalu dikaitkan dengan waktu luang atau rekreasi.
4. Wisatawan tidak terlibat dalam mencari nafkah di tempat tujuan mereka, tetapi hanya bertindak sebagai konsumen.

Selain itu, Suwena & Widyatmaja dalam Yuniningsih (2025) juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam jenis pariwisata antara lain:

1. Menurut letak geografis, di mana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
 - a. Pariwisata lokal (*local tourism*) merupakan pariwisata yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu

saja, seperti kepariwisataan Kota Semarang dan kepariwisataan Kota Yogyakarta.

- b. Pariwisata regional (*regional tourism*) merupakan aktivitas pariwisata yang dikembangkan di suatu daerah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional, seperti kepariwisataan Yogyakarta, Bali, dan lain-lain.
 - c. Pariwisata nasional (*national tourism*) merupakan jenis pariwisata yang dikembangkan di wilayah suatu negara, di mana para wisatawan tidak dari warga negaranya sendiri saja, namun juga wisatawan asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di wilayah-wilayah dalam satu wilayah Indonesia.
 - d. Pariwisata regional-internasional merupakan aktivitas pariwisata yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, namun melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.
 - e. Pariwisata internasional (*International tourism*) merupakan aktivitas dalam pariwisata yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.
2. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
- a. Pariwisata aktif (*in bound tourism*) merupakan aktivitas pariwisata yang ditandai oleh gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentunya akan mendapatkan masukan devisa bagi

negara yang telah dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.

- b. Pariwisata pasif (*outgoing tourism*) merupakan aktivitas pariwisata yang ditandai dengan keberangkatan warga negaranya untuk bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Dari segi perolehan devisa, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dikeluarkan dihabiskan di luar negeri.

3. Menurut Objeknya

- a. *Cultural tourism* merupakan jenis pariwisata yang mendorong wisatawan untuk melakukan perjalanan karena tertarik pada atraksi wisata budaya dan seni suatu tempat.
- b. *Recuperational tourism* merupakan jenis pariwisata yang bertujuan guna dapat menyembuhkan penyakit, seperti pemandian di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
- c. *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata yang mendorong para wisatawan untuk melakukan perjalanan terkait dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
- d. *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata yang mendorong para wisatawan untuk melakukan perjalanan, melihat atau menyaksikan suatu *event* olahraga di suatu daerah atau negara tertentu.
- e. *Political tourism* yaitu jenis perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan untuk menyaksikan secara langsung peristiwa atau aktivitas

yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu Negara.

- f. *Social tourism* merupakan suatu jenis pariwisata yang dari segi penyelenggaraannya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, misalnya picknik, study tour, dan lain-lain.
- g. *Religion tourism* yaitu suatu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk berwisata tujuannya menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
- h. *Marine tourism* yaitu aktivitas berwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk memancing, menyelam, berenang, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

Berdasarkan jenis pariwisata maka Desa Wisata Liyangan dapat dikategorikan sebagai berikut *pertama*, berdasarkan letak geografis dapat dikategorikan pariwisata lokal (*local tourism*) karena ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Kedua, bila didasarkan pada neraca pembayaran dikategorikan pariwisata aktif (*in bound tourism*) karena menambah kontribusi devisa negara. Ketiga jika dilihat dari objek pariwisata dikategorikan *cultural tourism* dan *religion tourism* karena di Desa Wisata Liyangan memiliki daya tarik wisata seni budaya seperti kompleks candi, arsitektur, ukiran, dan peninggalan benda cagar budaya.

1.6.2.5. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki fasilitas dan layanan pariwisata untuk memastikan wisatawan merasa nyaman di tujuan wisata (Rahayu & Saragih, 2022 : 94). Menurut Pebriyanti dalam Yuniningsih (2025) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata yaitu serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurut Yoeti dalam Yuniningsih (2025), mendefinisikan pengembangan pariwisata sebagai usaha sadar dan terencana untuk meningkatkan produk pariwisata yang sudah ada atau memperkenalkan produk baru untuk produksi dan pemasaran. Sedangkan menurut Soetomo dalam Yuniningsih (2025) mendeskripsikan pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang berwawasan ke depan dan dinamis yang bertujuan untuk mengatasi tantangan di sektor pariwisata.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pengembangan pariwisata adalah upaya dinamis dan terencana untuk meningkatkan fasilitas, layanan, dan produk pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan, meningkatkan pengalaman wisatawan, dan mengatasi tantangan masa depan di sektor pariwisata.

Lebih lanjut Yoeti (2022) dalam Yuniningsih (2025), menyebutkan bahwa guna menunjang pengembangan pariwisata di tempat tujuan wisata, maka perlu memperhatikan lima (5) aspek sebagai berikut: (1) *Traveler* (turis), (2) *Transportation* (transportasi), (3) *Attraction* (atraksi), (4) Fasilitas Pelayanan, dan (5) Informasi dan promosi.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009, daerah tujuan pariwisata merupakan suatu kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat kegiatan pariwisata dan telah dilengkapi dengan ketersediaan fasilitas pariwisata, daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas umum, serta masyarakat yang saling berinteraksi dan mendukung pengembangan pariwisata. Menurut Cooper et al. dalam Pratiwi (2023), berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata untuk pengembangan potensi kepariwisataan, yaitu:

a. *Attraction* (Daya Tarik Wisata)

Atraksi adalah sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan dalam bentuk pertunjukan atau show khusus bagi wisatawan. Atraksi mengacu pada elemen unik yang menarik wisatawan ke suatu destinasi, yang dapat diklasifikasikan ke dalam atraksi budaya, atraksi alam, dan atraksi buatan.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai tujuan wisata, termasuk infrastruktur transportasi dan konektivitas. Aspek ini memastikan bahwa wisatawan dapat dengan mudah mengakses destinasi wisata melalui jalan yang dibangun dengan baik, transportasi umum, dan fasilitas pendukung.

c. *Amenity* (Fasilitas)

Amenitas adalah fasilitas atau layanan tambahan dalam meningkatkan kenyamanan dan pengalaman wisatawan di suatu destinasi, yang mencakup akomodasi, layanan makan dan minum, tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas penting lain yang mendukung kenyamanan wisatawan.

d. *Ancillary* (Kelembagaan menyediakan layanan tambahan)

Ancillary adalah ketersediaan sebuah organisasi atau orang-orang yang mengurus destinasi tersebut. Elemen-elemen ini membantu memastikan pengalaman perjalanan yang lancar dan menyenangkan bagi wisatawan.

Dalam penelitian ini pengembangan pariwisata dilihat dari 4 (empat) aspek dalam pengembangan pariwisata yakni *attraction*, *amenity*, *accessibility*, dan *ancillary*.

1.6.2.6. Desa Wisata

Desa wisata adalah sebuah wilayah administratif desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, di mana mempunyai keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya (Kementerian Pariwisata, 2019). Hal ini selaras dengan pendapat Yoeti dalam Hidayati et al. (2023), desa wisata adalah suatu daya tarik dengan daya tarik tersendiri yang dapat dijadikan sebagai tujuan wisata. Sementara itu, Hadiwijoyo mendeskripsikan desa wisata sebagai kawasan pedesaan yang menawarkan gaya hidup lokal yang otentik, dengan potensi kegiatan wisata seperti atraksi, akomodasi, pengalaman kuliner, dan fasilitas pendukung lainnya (Hidayati et al., 2023).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa desa wisata adalah daerah pedesaan yang memiliki daya tarik unik, gaya hidup lokal yang otentik, dan potensi wisata, termasuk tradisi budaya, akomodasi, dan fasilitas pendukung.

Menurut Kementerian Pariwisata (2019), desa wisata dapat diidentifikasi berdasarkan kriteria, seperti (a) memiliki potensi atraksi wisata (termasuk daya tarik

wisata alam, budaya, dan wisata buatan atau kreatif; (2) memiliki komunitas yang mapan; (c) memiliki sumber daya manusia lokal yang mampu berkontribusi pada pengembangan desa wisata; (d) memiliki kelembagaan pengelola; (e) memiliki akses terhadap sarana dan prasarana dasar yang mendukung kegiatan pariwisata; (f) memiliki potensi dan peluang untuk memperluas pasar pariwisata.

Desa wisata memainkan peran penting dalam mengurangi urbanisasi dari desa ke kota dengan menciptakan peluang ekonomi yang beragam di dalam desa. Selain itu, desa wisata juga berperan sebagai sarana untuk melestarikan dan memperkuat warisan budaya lokal dan kearifan lokal di dalam masyarakat. Berikut jenis-jenis desa wisata yang dapat dijadikan acuan, antara lain (Kementerian Pariwisata, 2019):

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam, yaitu desa wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama, seperti gunung, lembah, pantai, danau, sungai, serta berbagai bentang alam unik lainnya..
- b. Desa wisata berbasis keunikan atau kekhasan sumber daya budaya lokal, yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat istiadat atau tradisi dan kehidupan sehari-hari warga sebagai daya tarik utama, termasuk kegiatan mata pencaharian, kegiatan keagamaan maupun kegiatan budaya lainnya.
- c. Desa wisata kreatif, yakni desa wisata yang menjadikan keunikan kegiatan ekonomi kreatif dari aktivitas industri rumah tangga warga setempat sebagai sebuah daya tarik utama, baik berupa kerajinan tangan maupun aktivitas seni khas.

- d. Desa wisata berbasis kombinasi, yaitu desa wisata yang memadukan atau menggabungkan satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya, dan buatan atau kreatif.

Menurut Kementerian Pariwisata (2019), pengembangan desa wisata dapat diuraikan dalam beberapa tahap, masing-masing mewakili posisi desa untuk mengidentifikasi program yang sesuai dan selaras dengan kemajuannya. Berikut beberapa kriteria dalam pengembangan desa wisata:

- a. Rintisan

Pada tahap awal, desa wisata memiliki potensi yang belum berkembang, infrastruktur terbatas, wisatawan minim, kesadaran masyarakat rendah, dan memerlukan bantuan yang besar dari pemerintah dan sektor swasta.

- b. Berkembang

Pada tahap berkembang, desa wisata mulai dikenal dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar dan wisatawan luar daerah, infrastrukturnya berkembang, kegiatan ekonominya berkembang. Namun, desa wisata belum terkelola dengan baik meskipun telah ada kesadaran kelompok, sehingga masih memerlukan dukungan pemerintah dan sektor swasta.

- c. Maju

Pada tahap kemajuan, desa wisata sudah dikenal di tingkat domestik dan internasional, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, masyarakatnya aktif dan sadar dalam mengelola usaha pariwisata, serta memanfaatkan dana desa untuk pembangunan lebih lanjut.

- d. Mandiri

Pada tahap mandiri, desa wisata diakui secara internasional, memenuhi standar global, memiliki inovasi dari masyarakat, berkolaborasi menggunakan konsep model *Pentahelix*, memanfaatkan dana desa secara strategis, dan secara mandiri memanfaatkan digitalisasi untuk promosi dan penjualan.

Menurut data dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2023b), bahwasanya Desa Wisata Liyangan termasuk dalam desa wisata dengan kriteria maju.

1.6.2.7. Pariwisata Terintegrasi

Pariwisata terintegrasi dapat dipahami sebagai salah satu bentuk upaya yang dapat membantu dalam memahami potensi pariwisata pada wilayah pedesaan agar tetap berkelanjutan dari sisi sosial, budaya, ekonomi, struktur alam dan manusia dari daerah atau wilayah tersebut (Sharpely, 2000; Swarbrooke, 1999, dalam Darmawan et al., 2021). Mengenai pariwisata terintegrasi, Timothy mengatakan bahwa pariwisata terintegrasi adalah pendekatan holistik yang bertujuan untuk memaksimalkan sinergi antara berbagai komponen pariwisata, termasuk sumber daya alam, warisan budaya, infrastruktur, dan masyarakat lokal (Riana & Fajri, 2024).

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata terintegrasi adalah pendekatan holistik yang berupaya menyelaraskan dan memaksimalkan sinergi antara sumber daya alam, warisan budaya, infrastruktur, dan masyarakat lokal untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan.

Aspek pengembangan pariwisata terintegrasi menurut (Alfiah et al., 2025) adalah sebagai berikut:

- a. Kedekatan Geografis, yaitu mengacu pada hubungan spasial antara tujuan wisata yang berbeda, memastikan mereka berada dalam jarak yang wajar satu sama lain untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas perjalanan.
- b. Atraksi Wisata, yaitu komponen inti yang menarik wisatawan ke sebuah destinasi, yang dapat diklasifikasikan menjadi: keanekaragaman tempat wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan, pemanfaatan keanekaragaman wisata, dan pusat informasi.
- c. Aksesibilitas, yaitu mengacu pada kemudahan untuk mengakses informasi, produk, layanan, dan lingkungan sosial yang memastikan kenyamanan bagi wisatawan.
- d. Fasilitas Pendukung, yaitu sarana tambahan yang melengkapi fasilitas utama. Fasilitas pendukung meningkatkan pengalaman dan kenyamanan wisatawan secara keseluruhan, yang terdiri dari: fasilitas dan layanan, serta infrastruktur utilitas
- e. Elemen Kelembagaan, yaitu organisasi atau pengelola dalam mencapai tujuan tertentu yang memfasilitasi pengembangan pariwisata, memastikan pengelolaan, dan koordinasi yang tepat di antara para pemangku kepentingan.
- f. Direksi, yaitu badan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas untuk kepentingan, sesuai dengan maksud dan tujuan badan atau pengelola.

1.6.2.8. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) dalam Rahayu & Saragih (2022) merupakan pariwisata yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan baik saat ini maupun masa depan, yang memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, dan masyarakat setempat. Menurut Swarbrooke dalam Pratiwi (2023), menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini sambil memastikan keberlanjutan jangka panjang, memungkinkan generasi mendatang untuk memanfaatkan dan meningkatkannya dalam kerangka sosial yang ada. Senada dengan itu, Susana et al. dalam Pratiwi (2023) menekankan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah konsep yang menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan terhadap lingkungan, ekonomi lokal, dan kondisi sosial dan budaya di destinasi wisata.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang menjamin kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat lokal, wisatawan, dan industri pariwisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan.

Dimensi *sustainable tourism* menurut Sinclair et al. dalam Hidayati et al. (2023) terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.

a. Dimensi Ekonomi

Dalam aspek ini menekankan pada bagaimana masyarakat lokal di destinasi wisata mendapatkan keuntungan finansial dari pariwisata. Keterlibatan

masyarakat sebagai partisipan aktif dalam kegiatan pariwisata sangat penting (Salazar dalam Hidayati et al., 2023).

b. Dimensi Sosial dan Budaya

Pariwisata berkelanjutan adalah suatu media dalam mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya yang merupakan aset utama pariwisata.

c. Dimensi Politik

Aspek politik tidak menjadi kajian meskipun dalam realita, aspek politik menjadi salah satu bahasan penting dari *sustainable tourism*.

d. Dimensi Lingkungan

Aspek ini berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Faktor lingkungan (ekologis) sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini dimensi politik tidak dikaji mengingat pembatasan penelitian hanya dilihat dari dimensi ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan. Selanjutnya sesuai dengan fokus penelitian ini tentang pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan maka fenomena yang akan diteliti akan dilihat dari dimensi ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan, kedekatan geografis, atraksi wisata, aksesibilitas, fasilitas pendukung, elemen kelembagaan, dan direksi.

1.6.2.9. Faktor Pendukung dalam Pengembangan Pariwisata

Faktor pendukung peran *stakeholder* menurut (Destiana et al., 2020) dalam pengembangan pariwisata adalah:

- a. Nilai adalah segala sesuatu yang dianut oleh setiap pemangku kepentingan, yang mempengaruhi sikap dan keterlibatan mereka.
- b. Komunikasi adalah seberapa sering para *stakeholder* dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mencapai tujuan bersama.
- c. Kepercayaan adalah keyakinan *stakeholder* dalam menentukan kesediaan mereka untuk menjalin kerjasama dalam rangka mencapai sasaran kolektif.
- d. Kebijakan adalah mencerminkan sejauh mana kebijakan yang ada mampu memfasilitasi hubungan dan jejaring antar *stakeholders* guna mewujudkan tujuan bersama.

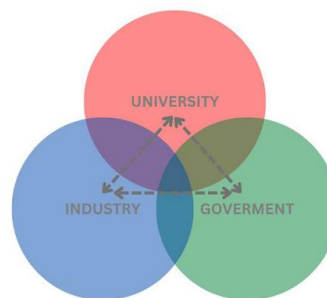
1.6.2.10. Model *Helix*

Beberapa konsep *helix* yang telah dikembangkan adalah *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, *Pentahelix* hingga *Hexa Helix* (Sturesson et al. dalam Hidayati et al. 2023).

a. Model *Triple Helix*

Model *Triple Helix* dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) dalam Missouri et al. (2021), menjelaskan bahwa inti dari model *Triple Helix* terletak pada interaksi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Sinergitas ketiga komponen tersebut dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business, and Government*). Akademisi menyumbangkan sumber daya, pengetahuan ilmiah, dan teknologi untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan. Bisnis berfokus pada kapitalisasi inovasi ini untuk menciptakan nilai ekonomi dan manfaat sosial. Sementara itu,

pemerintah berperan dalam memastikan stabilitas dan mendorong kolaborasi melalui regulasi yang mendukung. Model ini menggambarkan bagaimana strategi dan praktik inovasi muncul dari sinergi antara ketiga sektor ini, yang menyoroti peran penting teknologi dan akademisi dalam pembangunan ekonomi. Lucy Yang Lu & Etzkowitz dalam Kholis et al. (2021) mengemukakan bahwa pengembangan model inovasi *Triple Helix* terjadi dalam tiga tahap: 1) Transformasi internal dari setiap heliks; 2) Saling berpengaruhnya dari satu heliks terhadap heliks lainnya; 3) Terciptanya hal baru dalam ke 3 jaringan bidang; 4) Organisasi dari hubungan di antara ketiga heliks.



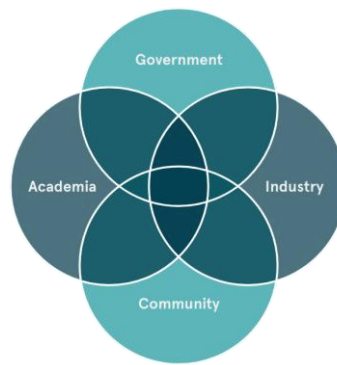
Gambar 1. 8 Model *Triple Helix*

Sumber: Zakaria et al. 2023

b. Model *Quadruple Helix*

Carayannis dan Campbell memperkenalkan konsep *Quadruple Helix* pada tahun 2009 sebagai pengembangan dari model *Triple Helix* yang diusulkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995. Model ini dikembangkan untuk mendefinisikan kembali dinamika masyarakat di abad ke-21. Sebagai pelopor konsep ini, Carayannis dan Campbell (2012) bertujuan untuk menciptakan pendekatan berwawasan ke depan yang menjawab tantangan kontemporer melalui solusi yang berkelanjutan, dengan mengintegrasikan

inovasi, kewirausahaan, dan demokrasi (Cai & Lattu, 2022). Kerangka kerja *Quadruple Helix* membangun kolaborasi di antara empat sektor utama: Akademisi (A), Bisnis (B), Masyarakat Sipil (C), dan Pemerintah (G).

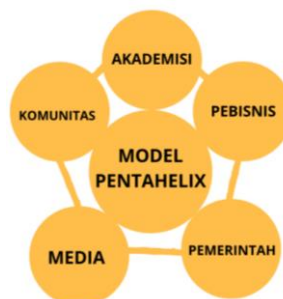


Gambar 1. 9 Model *Quadruple Helix*
Sumber: Day (2024)

c. Model *Pentahelix*

Model *Pentahelix* berasal dari konsep *Triple Helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000), yang melibatkan kolaborasi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah untuk meningkatkan penelitian inovatif dari institusi pendidikan menjadi produk atau layanan yang dapat dipasarkan. Dalam model *Pentahelix*, ketiga *stakeholder* ini diintegrasikan lebih lanjut dengan masyarakat dan media untuk meningkatkan sinergi. Jadi, model *Pentahelix* adalah optimasi peran *academic* (akademisi), *business* (bisnis), *community* (komunitas), *government* (pemerintah), dan *media* (media) atau sering disingkat ABCGM (Vani et al., 2020). Berikut merupakan penjelasan mengenai model *pentahelix* ABCGM:

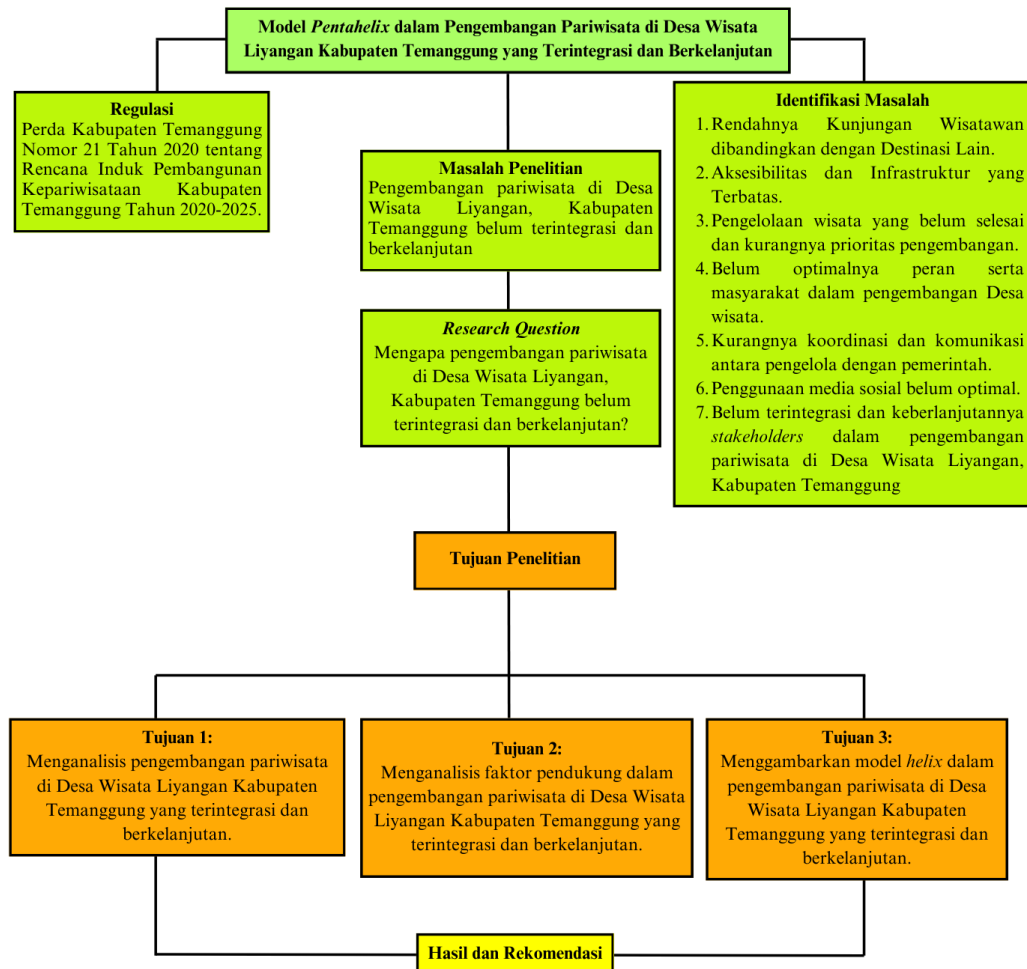
- 1) Akademisi (*Academics*) merupakan suatu sumber daya pengetahuan yang berperan sebagai konseptor. Artinya ahli yang memiliki konsep dan teori-toeri yang relevan.
- 2) Bisnis berperan sebagai enabler. Bisnis (*Business*) adalah entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 3) Komunitas (*Community*) berperan sebagai akselelator. Dalam hal ini komunitas terdiri dari individu-individu yang memiliki minat serupa terkait pengembangan desa wisata yang akan dikembangkan. Mereka berperan sebagai perantara atau penghubung antar *stakeholder* untuk membantu dan memfasilitasi pencapaian tujuan bersama.
- 4) Pemerintah (*Government*) berperan sebagai regulator sekaligus akselerator yang memiliki kewenangan membuat peraturan dan bertanggung jawab dalam mengembangkan pariwisata.
- 5) Media (*media*) berperan sebagai expender. Artinya media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*.



Gambar 1. 10 Model *Pentahelix*

Sumber: Vani et al. (2020)

1.7. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

1.8. Operasionalisasi Konsep

A. Pariwisata terintegrasi adalah pendekatan holistik yang berupaya menyelaraskan dan memaksimalkan sinergi antara sumber daya alam, warisan budaya, infrastruktur, dan masyarakat lokal untuk memastikan pembangunan berkelanjutan di daerah pedesaan.

1. *Kedekatan Geografis*, yaitu mengacu pada hubungan spasial antara destinasi wisata yang berbeda, memastikan mereka berada dalam jarak yang wajar satu sama lain untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas perjalanan. Gejala yang akan diamati adalah:
 - a. Kemudahan akses antar destinasi
 - b. Konektivitas antar lokasi wisata
 - c. Perjalanan antar destinasi tidak memerlukan waktu lama
2. *Atraksi Wisata*, yaitu komponen inti yang menarik wisatawan ke sebuah destinasi yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi seperti keanekaragaman tempat wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan, pemanfaatan keanekaragaman wisata yang ada, dan pusat informasi.
 - a. Keanekaragaman tempat wisata budaya, alam, dan buatan.
 - b. Pemanfaatan keanekaragaman tempat wisata
 - c. Pusat informasi
3. *Aksesibilitas*, yaitu mengacu pada kemudahan untuk mengakses informasi, produk, dan layanan yang memastikan kenyamanan bagi wisatawan.

- a. Kemudahan mengakses informasi
 - b. Kemudahan mengakses produk
 - c. Kemudahan mengakses layanan
4. *Fasilitas Pendukung*, yaitu sarana pelengkap dari fasilitas utama yang berperan dalam menunjang kenyamanan dan memperkaya pengalaman wisatawan secara menyeluruh.
- a. Tersedianya toilet, tempat duduk, dan tempat sampah
 - b. Tersedianya pusat informasi wisata
 - c. Adanya papan petunjuk arah dan peta kawasan
5. *Elemen Kelembagaan*, yaitu organisasi atau pengelola dalam mencapai tujuan tertentu yang memfasilitasi pengembangan pariwisata, memastikan pengelolaan dan koordinasi yang tepat di antara para pemangku kepentingan.
- a. Keterlibatan lembaga lokal
 - b. Adanya forum koordinasi antar *stakeholder*
 - c. Kejelasan struktur organisasi pariwisata
6. *Direksi*, yaitu badan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kepentingan yang sesuai dengan maksud dan tujuan badan atau pengelola.
- a. Tersedianya dokumen legal formal (SK, akta, dan sebagainya.)
 - b. Adanya program kerja yang terstruktur
 - c. Keputusan strategis dikeluarkan oleh direksi secara berkala

B. Pariwisata berkelanjutan adalah pembangunan pariwisata yang menjamin kemanfaatan jangka panjang bagi masyarakat lokal, wisatawan, dan industri pariwisata dengan memepertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan.

1. *Ekonomi*, yaitu *stakeholder* yang mendapatkan keuntungan finansial dari pariwisata. Seperti dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

- a. Pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata
- b. Terserapnya tenaga kerja lokal dari sektor pariwisata
- c. Tumbuhnya usaha mikro (UMKM)

2. *Sosial dan Budaya*, yaitu suatu media dalam mendukung pelestarian sumber daya alam dan budaya yang merupakan aset utama pariwisata. Dalam hal ini mengacu pada terbentuknya kelompok sadar wisata, pelestarian budaya, dan tradisi masyarakat lokal sambil mempromosikan kesejahteraan sosial dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal.

- a. Adanya kelompok sadar wisata dalam pelestarian budaya lokal
- b. Adanya program edukasi budaya bagi wisatawan
- c. Penyelenggaraan festival budaya

3. *Lingkungan*, yaitu pemanfaatan lingkungan secara berkelanjutan sambil meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pariwisata. Pengembangan destinasi pariwisata dengan menerapkan prinsip

ekologi (lingkungan) dalam pengelolaannya dan adanya dukungan masyarakat dalam upaya konservasi atau pelestarian budaya.

- a. Dukungan *stakeholder* dalam upaya konservasi atau pelestarian budaya
- b. Penggunaan energi terbarukan pada fasilitas wisata
- c. Adanya sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

C. Faktor Pendukung Pengembangan Pariwisata

Faktor pendukung adalah elemen yang memfasilitasi dan meningkatkan keberhasilan suatu program, kegiatan, dan tujuan dalam perkembangan pariwisata. Gejala yang diamati adalah sebagai berikut:

1. *Nilai* adalah segala sesuatu yang dianut oleh setiap pemangku kepentingan, yang mempengaruhi sikap dan keterlibatan mereka.
 - a. Adanya nilai di dalam pengelolaan pariwisata
 - b. Adanya komitmen bersama di antara *stakeholder*
 - c. Adanya partisipasi berdasarkan nilai budaya lokal
2. *Komunikasi* adalah seberapa sering para *stakeholder* dalam berinteraksi, berkolaborasi, dan berkoordinasi, baik secara lisan maupun tertulis, untuk mencapai tujuan bersama.
 - a. Intensitas pertemuan rutin antar *stakeholder*
 - b. Efektivitas penyampaian informasi terkait pengembangan wisata
 - c. Adanya media komunikasi yang aktif (grup WA, forum rutin)

3. *Kepercayaan* adalah keyakinan *stakeholder* dalam menentukan kesediaan mereka untuk menjalin kerjasama dalam rangka mencapai sasaran kolektif.
 - a. Transparansi dalam pengelolaan dana pengembangan wisata
 - b. Kesediaan berbagi sumber daya antar pihak
 - c. Ketersediaan mekanisme penyelesaian konflik yang adil
4. *Kebijakan* adalah mencerminkan sejauh mana kebijakan yang ada mampu memfasilitasi hubungan dan jejaring antar *stakeholder* guna mewujudkan tujuan bersama.
 - a. Dukungan regulasi terhadap kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata
 - b. Adanya insentif untuk kolaborasi antar pelaku wisata
 - c. Sinkronisasi program antar *stakeholder*

D. Model *Helix*

Model *helix* melibatkan para *stakeholder* yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pariwisata di Desa wisata Liyangan, adalah sebagai berikut:

1. *Triple Helix*: 3 *stakeholder* yang terlibat (akademis, bisnis, pemerintah)
2. *Quadruple Helix*: terdapat empat *stakeholder* yang terlibat (akademis, bisnis, pemerintah, masyarakat sipil).
3. *Pentahelix*: terdapat lima *stakeholder* yang terlibat (akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, media massa).

1.9. Argumen Penelitian

Keterlibatan *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata adalah salah satu variabel yang penting dalam paradigma Administrasi Publik sebagai *governance*. Paradigma ini menegaskan bahwa pusat perhatian administrasi tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, namun juga melibatkan berbagai *stakeholder* di luar lingkup pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan publik (Henry, 1990 dalam Qomariyah, 2024 : 129).

Pengembangan pariwisata dapat terlaksana melalui sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik yang melibatkan partisipasi aktif dari semua *stakeholder*, sehingga membentuk suatu hubungan. Model *Helix*, khususnya *Triple Helix*, *Quadruple Helix*, dan *Pentahelix*, menawarkan sebuah kerangka kerja kolaboratif yang relevan dan strategis dalam pengembangan sektor pariwisata. Model *Triple Helix* yang dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (2000) dalam Missouri et al. (2021), menjelaskan bahwa inti dari model *Triple Helix* terletak pada interaksi antara akademisi, bisnis, dan pemerintah. Selanjutnya, Carayannis dan Campbell (2012) mengembangkan model *helix* yang disebut *Quadruple Helix* dengan menambahkan peran masyarakat sipil sebagai *stakeholders* penting dalam penciptaan bersama dan penerimaan sosial terhadap pengembangan pariwisata (Cai & Lattu, 2022). Sementara itu, model *Pentahelix* mengoptimalkan peran *stakeholder* dengan memasukkan media sosial (Vani et al., 2020). Melalui interaksi kelima *stakeholder* ini, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.10. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya sistematis untuk menyelidiki dan mengeksplorasi suatu masalah melalui penerapan metode ilmiah yang cermat dan tepat. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh, memproses, dan menganalisis data secara terstruktur dan objektif, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang beralasan. Langkah-langkah ini dilakukan dengan maksud untuk mengatasi masalah tertentu atau menguji hipotesis, sehingga menghasilkan pengetahuan yang berkontribusi pada peningkatan kehidupan manusia (Tamaulina et al., 2024 : 1).

1.10.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Tamaulina et al., 2024 : 8) metode kualitatif adalah metode yang memungkinkan eksplorasi dan penggambaran yang komprehensif dari masalah yang diteliti. Metode kualitatif dalam penelitian ini dapat menyajikan data-data terkait model *Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.

1.10.2. Situs Penelitian

Situs atau lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai penelitian. Dalam penelitian tentang model *Pentahelix* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang Terintegrasi dan Berkelanjutan. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan data yang menyatakan bahwa Desa Wisata Liyangan merupakan desa wisata yang dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan, Kabupaten Temanggung belum terintegrasi dan berkelanjutan.

1.10.3. Fenomena Penelitian

Fenomena Penelitian merujuk pada kejadian, peristiwa, dan kondisi yang menjadi fokus utama dalam suatu studi. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala yang Diamati	Informan	Interview Guide
1.	Pariwisata Terintegrasi	Kedekatan Geografis	a. Kemudahan akses antar destinasi. b. Konektivitas antar lokasi wisata. c. Perjalanan antar destinasi tidak memerlukan waktu lama.	1. Pengelola Desa Wisata/ POKDARWIS (kelompok sadar wisata) 2. Pegawai Kantor Desa Purbosari 3. BUMDes 4. Wisatawan 5. Akademisi 6. Media Massa	1. Apakah Desa Wisata Liyangan mudah di akses antar destinasi wisata lain? 2. Sejauh mana konektivitas antar lokasi wisata memengaruhi pola perjalanan dan kepuasan wisatawan di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana waktu tempuh antar destinasi wisata?
		Atraksi Wisata	a. Keanekaragaman tempat wisata. b. Pemanfaatan keanekaragaman tempat wisata. c. Pusat informasi.		1. Apa saja atraksi budaya, atraksi alam, dan atraksi buatan yang ada di Desa Wisata Liyangan? 2. Bagaimana keanekaragaman tempat wisata dimanfaatkan dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana peran pusat informasi pariwisata dalam mendukung kebutuhan informasi wisatawan di Desa Wisata Liyangan?

		Aksesibilitas	a. Kemudahan mengakses informasi. b. Kemudahan mengakses produk. c. Kemudahan mengakses layanan.		1. Bagaimana pengalaman masyarakat dan wisatawan dalam mengakses informasi publik terkait pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 2. Bagaimana persepsi pelaku UMKM dan konsumen terhadap kemudahan akses terhadap produk-produk lokal di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana pengalaman masyarakat dan wisatawan dalam mengakses layanan publik dan layanan wisata di Desa Wisata Liyangan?
		Fasilitas Pendukung	a. Tersedianya toilet, tempat duduk, dan tempat sampah. b. Tersedianya pusat informasi wisata. c. Adanya papan petunjuk arah dan peta kawasan		1. Bagaimana ketersediaan dan kondisi fasilitas dasar seperti toilet, tempat duduk, dan tempat sampah di Desa Wisata Liyangan? 2. Sejauh mana efektivitas pusat informasi dalam mendukung pengalaman wisata yang terintegrasi? 3. Bagaimana wisatawan memaknai keberadaan papan petunjuk arah dan peta kawasan dalam membantu navigasi selama berkunjung di Desa Wisata Liyangan?
		Elemen Kelembagaan	a. Keterlibatan lembaga lokal b. Adanya forum koordinasi antar <i>stakeholder</i> c. Kejelasan struktur organisasi pariwisata		1. Bagaimana bentuk keterlibatan lembaga lokal dalam proses pengembangan pariwisata terintegrasi di Desa Wisata Liyangan? 2. Bagaimana mekanisme koordinasi antar <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana kejelasan struktur organisasi pengelolaan pariwisata di Desa Wisata Liyangan?

		Direksi	a. Tersedianya dokumen legal formal b. Adanya program kerja yang terstruktur c. Keputusan strategis dikeluarkan oleh direksi secara berkala		1. Apakah terdapat dokumen legal formal, seperti SK atau akta pendirian yang berpengaruh ke arah kerja direksi dalam pengembangan pariwisata terintegrasi? 2. Apakah program kerja direksi mencerminkan kesiapan organisasi dalam mengelola pengembangan pariwisata secara terintegrasi? 3. Bagaimana proses pengambilan keputusan strategis dilakukan oleh direksi dalam konteks pengembangan pariwisata terintegrasi?
	Pariwisata Berkelanjutan	Ekonomi	a. Pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata b. Terserapnya tenaga kerja lokal dari sektor pariwisata c. Tumbuhnya usaha mikro (UMKM)		1. Apa saja bentuk kegiatan pariwisata yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan masyarakat lokal? 2. Bagaimana sektor pariwisata berperan dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana pelaku UMKM lokal memanfaatkan peluang ekonomi dari aktivitas pariwisata?
		Sosial dan Budaya	a. Adanya kelompok sadar wisata dalam pelestarian budaya lokal b. Adanya program edukasi budaya bagi wisatawan		1. Bagaimana peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal di tengah pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 2. Apakah terdapat program edukasi budaya bagi wisatawan, dan bagaimana dampaknya terhadap pemahaman wisatawan terhadap budaya lokal?

			c. Penyelenggaraan festival budaya		3. Bagaimana keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam merancang dan menjalankan festival budaya sebagai bagian dari promosi wisata berkelanjutan?
		Lingkungan	a. Dukungan <i>stakeholder</i> dalam upaya konservasi atau pelestarian b. Penggunaan energi terbarukan atau mempertimbangkan lingkungan pada fasilitas wisata c. Adanya sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan		1. Bagaimana bentuk dukungan <i>stakeholder</i> dalam upaya pelestarian lingkungan di Desa Wisata Liyangan? 2. Apakah Desa Wisata Liyangan sudah menggunakan energi terbarukan atau mempertimbangkan lingkungan pada fasilitas wisata? 3. Bagaimana sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Desa Wisata Liyangan dalam mendukung pariwisata berkelanjutan?
2.	Faktor Pendukung dalam Pengembangan Pariwisata	Nilai	a. Adanya nilai di dalam pengelolaan pariwisata b. Adanya komitmen bersama di antara <i>stakeholder</i> c. Adanya partisipasi berdasarkan nilai budaya lokal		1. Apakah terdapat nilai yang dianut di Desa Wisata Liyangan? 2. Bagaimana bentuk komitmen bersama yang terbangun di antara para pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana pengaruh nilai-nilai budaya lokal terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata di Desa Wisata Liyangan?

		Komunikasi	- Intensitas pertemuan rutin antar <i>stakeholder</i> - Efektivitas penyampaian informasi terkait pengembangan wisata - Adanya media komunikasi yang aktif (grup WA, forum rutin)		- Bagaimana intensitas pertemuan rutin antar <i>stakeholder</i> mempengaruhi kelancaran proses pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? - Bagaimana efektivitas penyampaian informasi antar <i>stakeholder</i> memengaruhi kesamaan persepsi dan tindakan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? - Bagaimana peran media komunikasi aktif, seperti grup WhatsApp atau forum rutin, dalam memperkuat koordinasi antar <i>stakeholder</i> pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan?
		Kepercayaan	- Transparansi dalam pengelolaan dana pengembangan wisata - Kesediaan berbagi sumber daya antar pihak - Ketersediaan mekanisme penyelesaian konflik yang adil		- Apakah terdapat bentuk transparansi dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? - Bagaimana kesediaan antar <i>stakeholder</i> untuk berbagi sumber daya (finansial, informasi, tenaga) dalam upaya pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? - Bagaimana mekanisme penyelesaian konflik antar <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan pariwisata dijalankan, dan sejauh mana mekanisme tersebut dianggap adil oleh <i>stakeholder</i> di Desa Wisata Liyangan?

		Kebijakan	a. Dukungan regulasi terhadap kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata b. Adanya insentif untuk kolaborasi antar pelaku wisata c. Sinkronisasi program antar <i>stakeholder</i>		1. Bagaimana regulasi yang ada mendukung atau menghambat kerjasama antar <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 2. Bagaimana bentuk insentif yang diberikan untuk mendorong kolaborasi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan? 3. Bagaimana proses sinkronisasi program antar <i>stakeholder</i> dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan, dan apa tantangan yang dihadapi?
3.	Model <i>Helix</i>	<i>Triplehelix</i>	Akademis, Bisnis, Pemerintah		1. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan?
		<i>Quadrupelhelix</i>	Akademis, Bisnis, Pemerintah, Masyarakat sipil		2. Bagaimana peran masing-masing <i>stakeholder</i> ?
		<i>Pentahelix</i>	Akademis, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, Media massa		3. Apa kendala yang dihadapi tiap <i>stakeholder</i> dalam pengembangan pariwisata?

Sumber: Data Diolah Peneliti (2025)

1.10.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai sumber informasi dan memiliki pemahaman mengenai fenomena yang diteliti, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah metode yang dilakukan dalam pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Maka, untuk menentukan informan utama menggunakan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, *snowball sampling* adalah teknik yang dilakukan secara bertahap dari jumlah kecil hingga jumlah besar (Sahir, 2022 : 36). Teknik *snowball sampling* digunakan untuk memilih informan secara sengaja berdasarkan kebutuhan penelitian, dengan informan selanjutnya diidentifikasi melalui informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh partisipan sebelumnya. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Wisata Liyangan karena lembaga tersebut ditunjuk sebagai lokasi penelitian.

1.10.5. Jenis Data

Menurut (Sahir, 2022 : 6) jenis data dalam metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada interpretasi terhadap suatu fenomena dengan pengumpulan dan analisis data yang disajikan secara deskriptif dalam bentuk penjelasan verbal dari subjek penelitian, serta melibatkan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Jenis data kualitatif yang dipakai, seperti pengamatan, rekaman, wawancara, atau studi

literatur mengenai pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan Kabupaten Temanggung yang terintegrasi dan berkelanjutan.

1.10.6. Sumber Data

Menurut Sarwono (2006 : 209) dalam (Tamaulina et al., 2024 : 46) data kualitatif dapat dikategorikan ke dalam dua berdasarkan sumbernya, yaitu:

1. Data primer, yakni sumber data dalam bentuk teks yang didapat secara langsung dari wawancara dan interaksi dengan informan yang menjadi subjek penelitian. Data primer biasanya direkam atau didokumentasikan oleh peneliti selama proses wawancara. Penelitian ini akan mewawancarai Pokdarwis Desa Wisata Liyangan dan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan.
2. Data Sekunder, yakni sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui sumber perantara, seperti catatan, buku, dokumentasi, maupun arsip yang telah ada, baik yang telah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi dokumen, peraturan, laporan penelitian, tesis, disertasi, jurnal akademis, artikel berita, dan informasi yang didapat dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

Secara umum, data kualitatif mencakup berbagai sumber informasi, termasuk fenomena atau peristiwa yang tidak dapat dikuantifikasi atau diukur secara numerik.

1.10.7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki wawasan dan pengetahuan

teoritis yang luas. Menurut Marshal dan Rossman dalam (Tamaulina et al., 2024 : 169) teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Nasution dalam (Tamaulina et al., 2024 : 169) observasi adalah data yang diperoleh pada kondisi senyatanya dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini melakukan observasi pada Pokdarwis Desa Wisata Liyangan agar mendapatkan data yang nyata di dalam sebuah penelitian.

2. Wawancara

Menurut Tamaulina et al., (2024 : 175) wawancara merupakan interaksi antara dua orang yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban yang bertujuan untuk membangun makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian wawancara dilakukan kepada *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Liyangan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa informasi secara langsung melalui *stakeholders* yang dipilih dalam memberi informasi pada penelitian.

3. Dokumen

Menurut Tamaulina et al., (2024 : 182) penelitian kualitatif dapat diperkaya melalui penggunaan analisis dokumen sebagai metode pelengkap observasi dan wawancara. Dokumen diartikan sebagai catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berbentuk teks tertulis, gambar, atau karya-karya penting yang dihasilkan oleh seseorang. Pada penelitian ini dokumentasi berupa gambar atau foto ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara.

1.10.8. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Miles (2014) dalam (Fiantika et al., 2022 : 15) terdapat tiga langkah dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses menyederhanakan, meringkas, memilih informasi yang krusial, menggolongkan, dan memfokuskan pada elemen-elemen kunci dalam tema dan pola yang sama. Data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahap selanjutnya.

2. ATLAS.ti

Dalam penelitian ini, perangkat lunak yang digunakan oleh peneliti adalah ATLAS.ti. ATLAS.ti digunakan sebagai alat analisis data kualitatif untuk menyajikan temuan dengan cara yang lebih terorganisir dan mudah dipahami. Perangkat lunak ini memfasilitasi dalam pengelolaan dan pengkodean data yang telah terkumpul, sehingga meningkatkan proses analisis yang sistematis, efisien, dan terstruktur. Selain itu, ATLAS.ti memungkinkan analisis yang komprehensif dan terorganisir dengan baik dalam berbagai format data, termasuk rekaman audio, video, gambar, dan data tekstual.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, diagram, hubungan kategori, flowchart, dan lain-lain.

Penyajian data kualitatif sering kali berbentuk teks naratif, yang dapat dilengkapi dengan grafik, matriks, bagan, atau alat bantu visual sejenisnya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penelitian kualitatif menekankan pada penemuan temuan-temuan baru sebagai hasil akhir dari kesimpulan penelitian. Temuan tersebut, dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu destinasi yang sebelumnya masih belum jelas keberadaannya.

1.10.9. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Pada penelitian ini menggunakan salah satu metode untuk melakukan pengecekan pada kualitas data yaitu triangulasi. Menurut (Fiantika et al., 2022 : 61) triangulasi adalah metode yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber pengumpulan data untuk meningkatkan kualitas penelitian. Pendekatan ini menghasilkan data yang lebih komprehensif, konsisten, dan dapat diandalkan. Menurut (Sugiyono, 2018 : 369) terdapat berbagai bentuk triangulasi, di antaranya:

1. Triangulasi Sumber

Pada triangulasi ini dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan metode pengecekan data dari sumber yang sama, namun menggunakan teknik berbeda seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh perspektif yang beragam namun saling melengkapi.

3. Triangulasi Waktu

Metode ini melibatkan pengecekan data menggunakan teknik yang sama, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan waktu yang berbeda karena pada teknik ini waktu menjadi faktor utama dalam kredibilitas data.

Penelitian ini dalam hal memperoleh data dilakukan dari berbagai sumber. Peneliti dalam memperoleh data menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan. Seperti dalam hal wawancara peneliti tidak hanya melakukan wawancara pada waktu tertentu dan pada satu informan saja, namun peneliti melakukan wawancara di beberapa waktu yang berbeda dan memilih informan yang berbeda. Dengan hasil wawancara tersebut disesuaikan dengan metode pengambilan data lain, seperti observasi dan dokumentasi.